

**PROGRAM PENANGGULANGAN MASYARAKAT
MISKIN PERKOTAAN**

(Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota
Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

PRIANDANU ARIYANTHA

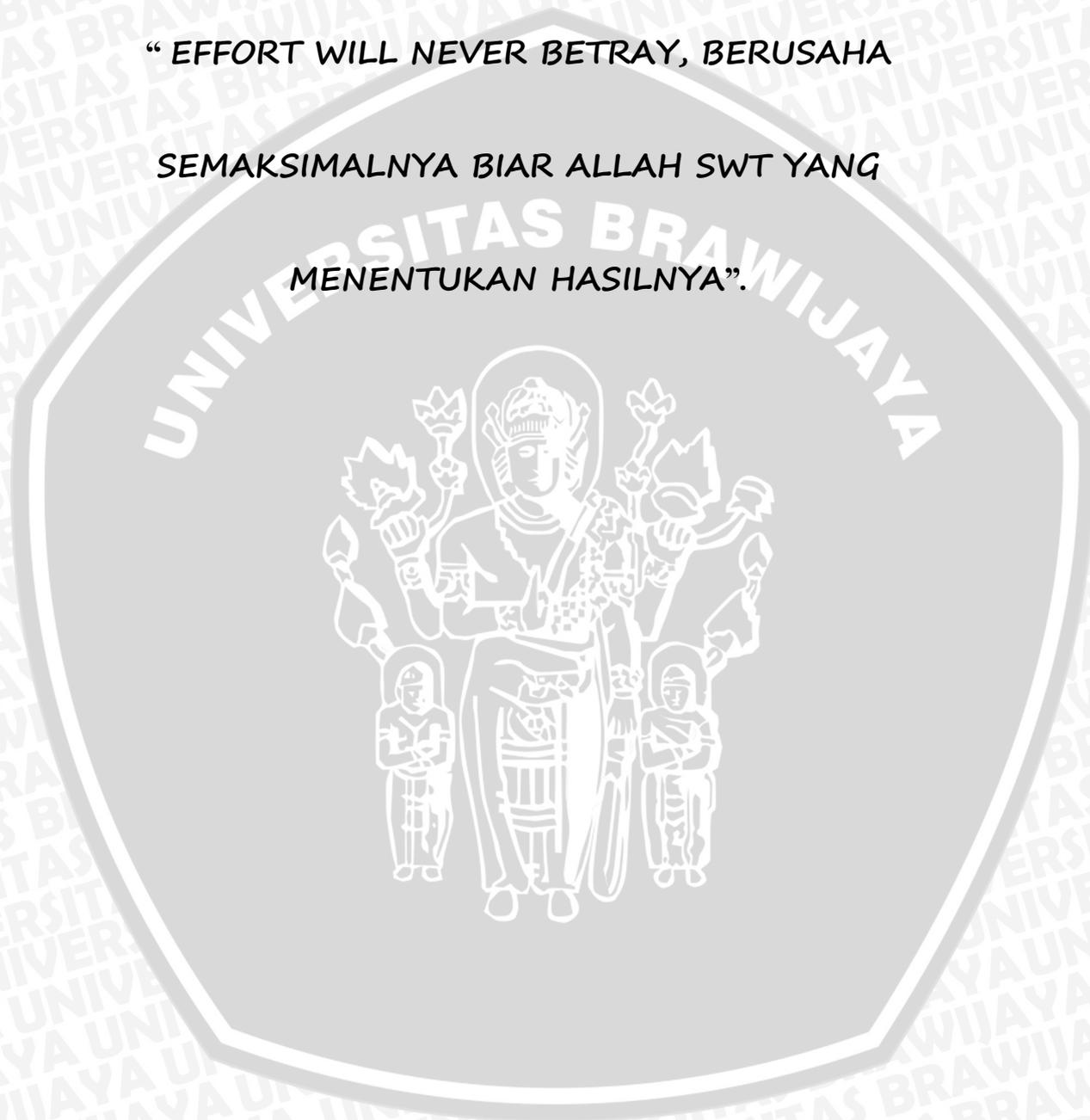
NIM. 0910310285



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016**

MOTTO

**“ EFFORT WILL NEVER BETRAY, BERUSAHA
SEMAKSIMALNYA BIAR ALLAH SWT YANG
MENENTUKAN HASILNYA”.**





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : "PROGRAM PENANGGULANGAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN" (Studi
Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan
Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)"

Disusun oleh : Priandanu Ariyantha

NIM : 0910310285

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 18 April 2016

Komisi Pembimbing

Ketua

Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP.19690524 200212 2 002

Anggota

Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP.19730713 200604 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 4 Agustus 2016
Jam : 11.00
Skripsi atas nama : Priandanu Ariyantha
Judul : PROGRAM PENANGGULANGAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN (Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)

dan dinyatakan Lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Anggota



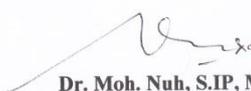
Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19703713 200604 1 001

Anggota



Dr. Siti Rochmah, M.Si
NIP. 19570313 198601 2 001

Anggota



Dr. Moh. Nuh, S.IP, M.Si
NIP. 19710628 200604 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 24 Juni 2016

Mahasiswa



Nama : Priandanu Ariyantha
NIM : 0910310285

RINGKASAN

Priandanu Ariyantha, 2016. **Program Penanggulangan Masyarakat Miskin Perkotaan (Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)**. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si dan Ainul Hayat, S.Pd, M.Si, 141 hal + xv

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, khususnya pada Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan. Kelurahan Parteker adalah salah satu wilayah yang melaksanakan program PNPM-MP ini untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di wilayah kelurahan. Sasaran dalam program PNPM-MP ini adalah Masyarakat. Pengembangan sektor Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi secara bersamaan melalui program PNPM-MP ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di wilayah kelurahan Parteker.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara narasumber, observasi lapangan, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya program di kelurahan Parteker. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan proses pelaksanaan program sudah berjalan sesuai dengan pedoman dan telah diupayakan secara maksimal oleh para *stakeholder*. Namun dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala yang menghambat keberlangsungan program antara lain terjadinya *overload* tugas pada salah satu *stakeholder*, terdapat *stakeholder* yang kurang melaksanakan tugasnya dengan baik, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akibat minimnya antusiasme.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya dilakukan penyuluhan lebih lanjut terkait program kepada semua *stakeholders*, perlunya pemantauan berkala dari pihak pemerintah saat proses perencanaan hingga evaluasi program, perlunya pemberian motivasi kepada masyarakat agar tingkat antusiasme dan konsistensi masyarakat terhadap pelaksanaan program menjadi lebih baik.

Kata Kunci : program, kemiskinan, pemberdayaan masyarakat mandiri, pamekasan

SUMMARY

Priandanu Ariyantha, 2016. **Program Of Urban Poor Prevention (Studies in Urban Village Community Empowerment in Parteker Village, Sub-district Kota, Pamekasan)**. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si and Ainul Hayat, S.Pd, M.Si, 141 Pages + xv

This research was conducted with the aim to describe the National Program for Urban Community Empowerment(PNPM-MP), in particular on Community Self-Reliance Agency in Sub Parteker City District Pamekasan. Parteker is one of the areas that has implemented this PNPM-MP program. The Target of this PNPM-MP program is the Society. The development of Social sector, Enviromental sector, and Economic sector simultaneously through this PNPM-MP program is to improve the living conditios of the poor people in Parteker villages.

This research used descriptive methode with qualitative approach, techniques to collect the data include interviews, observation, and documentation. The focus of this research is the implementation of Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) and all factors that influence the program in Parteker village. The data analysis methods is using a Miles, Huberman, and Saldana model.

The results of this research showed that the overall process of implementation of the program is already running in accordance with the guidelines and has strived to the maximum by the stakeholders. However, in the process of implementation there are obstacles that obstruct the sustainability of the program like the overload assignment on one of the stakeholders, there are stakeholders who didn't do their job properly, lack of community participation in the development process due to lack of enthusiasm.

Suggestions in this research is a further extension should be conducted related to the program to all stakeholders, the need for regular monitoring of the government during the process of planning to evaluation programs necessary to provide motivation to the people, so the enthusiasm level and consistency of the community towards the implementation of the program could be better.

Keywords: program, poverty, pemberdayaan masyarakat mandiri, pamekasan

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia serta nikmat-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan persyaratan terakhir untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya.

Skripsi ini berjudul “PROGRAM PENANGGULANGAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan).”

Penulis selaku peneliti tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya dukungan maupun bantuan dari pihak-pihak yang telah memberikan pikiran, saran, maupun kritik demi kelancaran proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Sri Suhartati dan Bapak Slamet Riyanto yang tidak pernah lelah mendukung baik moral maupun materiil.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi



5. Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sekaligus sebagai ketua dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku anggota dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para dosen dan seluruh staf Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan selama kuliah.
8. Lurah Kelurahan Parteker, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa meneliti Proses Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Parteker.
9. Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat “Adil Makmur” Kelurahan Parteker beserta seluruh jajaran anggota yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Masyarakat Kelurahan Parteker dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada Mahneta Damayanti, Terima Kasih sudah bersedia menemani dan memberikan dukungannya selama ini. *i love you soooo damn much...*
12. Saudara-Saudaraku “SKDC”, Kevin, Rafi “Kepik”, Brian, Riza “Kajir”, Fireman, Reza “Godeg”, Yoga, Danis, Jimmy, Bagoes “Jo”, Aan, Ipunk, Thoriq, Andik, Jati, terima kasih atas dukungan kalian yang terselip dalam cecian dan guyonan yang gila dan frontal.

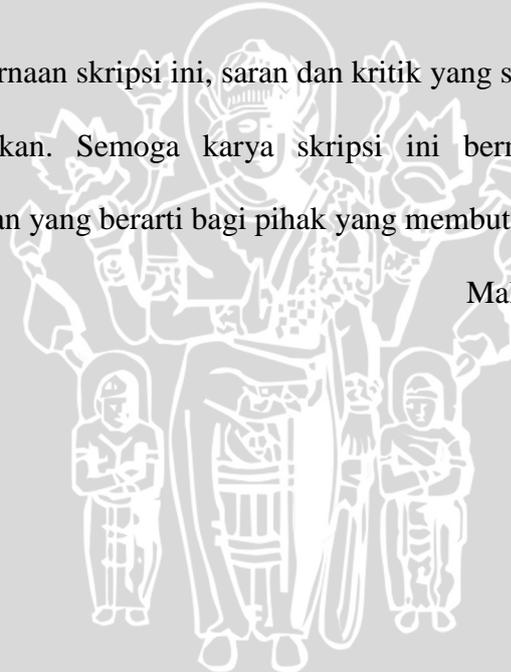
13. Kepada semua teman teman Fisip Hubungan Internasional 2009, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam dukungan dalam penyelesaian skripsi ini

14. Seluruh Anggota “Grup Penyamun”, yang sudah berjuang bersama dalam usahanya menyelesaikan skripsi

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2016

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penanggulangan Kemiskinan dalam Konteks Administrasi Pembangunan	14
1. Administrasi Publik	14
a. Definisi Administrasi Publik.....	14
b. Ruang lingkup Administrasi Publik	16
2. Administrasi Pembangunan	19
a. Definisi Administrasi Pembangunan	19
b. Paradigma Pembangunan	20
B. Pemberdayaan Masyarakat.....	23
1. Definisi Pemberdayaan	23
2. Strategi Pemberdayaan.....	25
3. Tujuan Pemberdayaan	28
4. Tahapan Pemberdayaan	30
5. Definisi Pemberdayaan Masyarakat.....	32
6. Kemiskinan	36
a. Definisi Kemiskinan.....	36



b. Jenis-jenis Kemiskinan.....	37
c. Faktor Penyebab Kemiskinan	40
C. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan(PNPM-MP)	41

BAB III METODE PENELITIAN 48

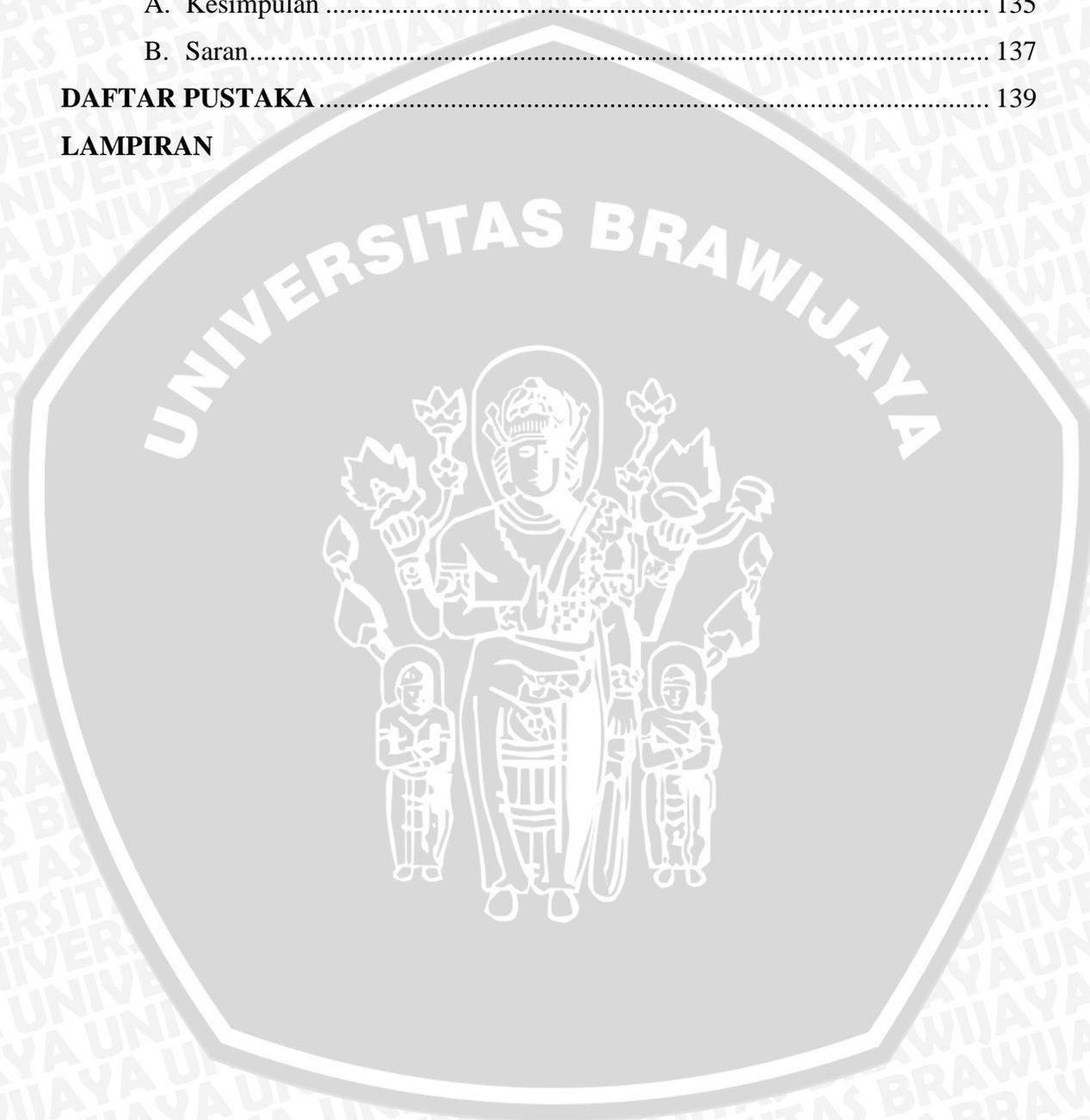
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Fokus Penelitian	50
D. Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Analisis Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 58

A. Gambaran Umum Lokasi Situs Penelitian	58
1.Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan	58
2.Gambaran Umum Kelurahan Parteker	70
B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian	74
1.Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan.....	73
a. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan.....	73
b. Peran Multiaktor dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan.....	90
c. Dampak Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan.....	108
2.Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan	111
C. Analisis Data Fokus Penelitian	116
1.Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan.....	115
a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan	115
b. Peran Multiaktor dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan	121
c. Dampak Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan	127
2.Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan	129



BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal.
1.	Analisis Data Model Interaktif, Miles, Huberman, dan Saldana	57
2.	Peta Wilayah Pamekasan	60
3.	Tampak Depan Kelurahan Parteker	71
4.	Struktur Organisasi Kelurahan Parteker	72
5.	Alur penanganan Kemiskinan Oleh Masyarakat Melalui PNPM-MP	74
6.	Struktur Organisasi BKM Adil Makmur	86
7.	Pembangunan Drainase oleh warga kelurahan Parteker	106
8.	Hasil Pembangunan Drainase oleh warga kelurahan parteker	106
9.	Pemasangan Paving Block oleh warga kelurahan parteker	107
10.	Hasil Pemasangan Paving Block oleh warga kelurahan parteker	107



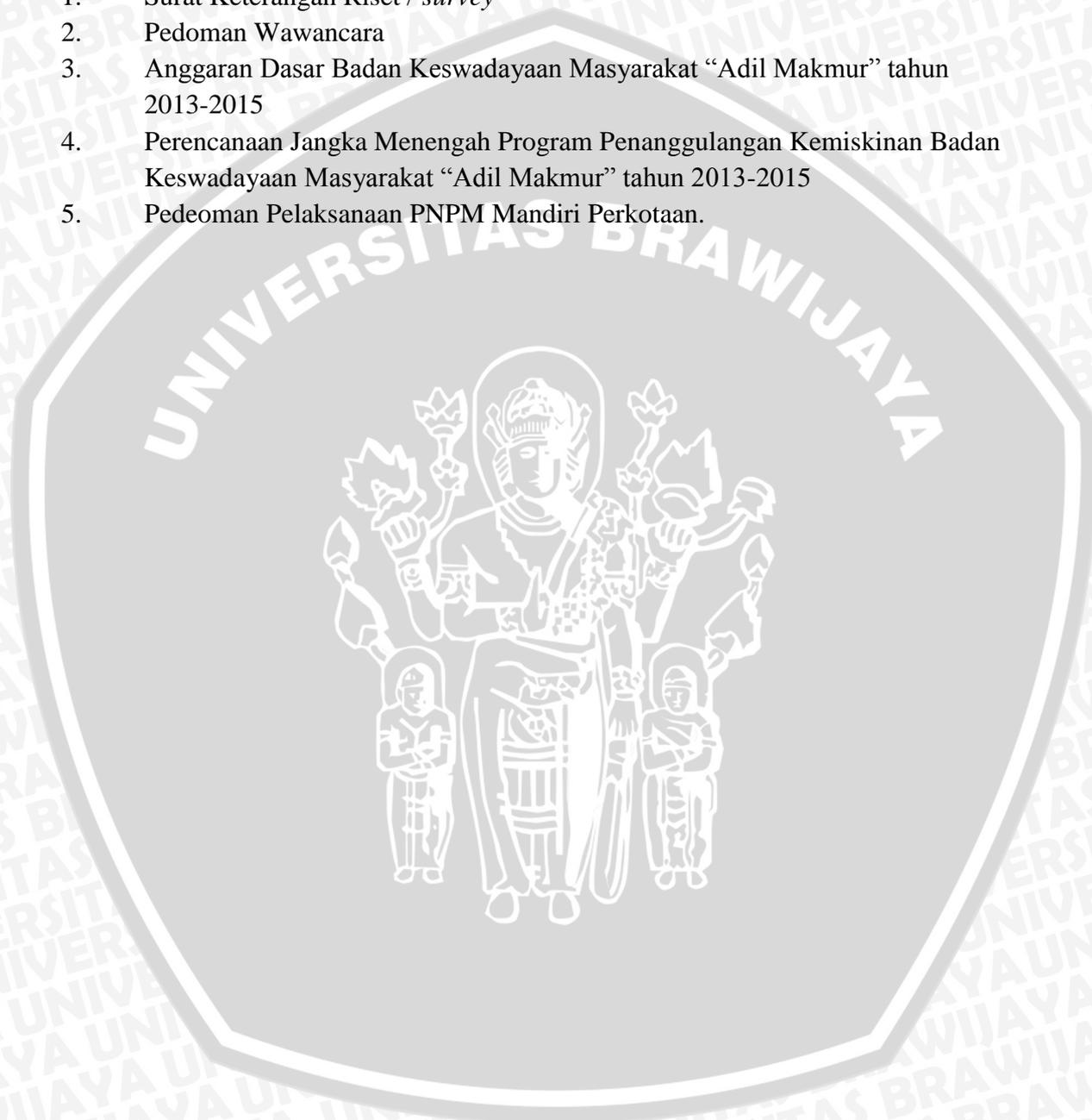
DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Luas Daerah Kabupaten Pamekasan Menurut Ketinggian	62
2.	Luas Daerah Kabupaten Pamekasan Menurut Kelerengan	62
3.	Luas Wilayah Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Struktur Batuan	64
4.	Klasifikasi Jenis Tanah Terhadap Erosi	65
5.	Luas Daerah Berdasarkan Klasifikasi Tekstur Tanah	65
6.	Jumlah Curah Hujan dan Rata-rata Curah Hujan	66
7.	Jenis Musim dan Temperatur Rata-rata Kabupaten Pamekasan	67
8.	Intensitas Hujan Kabupaten Pamekasan	68
9.	Jumlah Sungai di Kabupaten Pamekasan	68
10.	Jumlah Sumber/Mata Air Di Kabupaten Pamekasan	69
11.	Profesi Penduduk Kelurahan Parteker	73
12.	Fasilitas Sarana Prasarana Lingkungan Kelurahan Parteker	73
13.	Kelompok Sasaran dan Penerima Manfaat	77
14.	Kategori Alokasi Dana	82
15.	Tabel Eksisting Hasil Penelitian	133

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
-----	----------------

- | | |
|----|--|
| 1. | Surat Keterangan Riset / <i>survey</i> |
| 2. | Pedoman Wawancara |
| 3. | Anggaran Dasar Badan Keswadayaan Masyarakat “Adil Makmur” tahun 2013-2015 |
| 4. | Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan Badan Keswadayaan Masyarakat “Adil Makmur” tahun 2013-2015 |
| 5. | Pedeoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensional mencakup politik, ekonomi, aset, dan lain lain. Kemiskinan menurut penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan kata lain “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.

Masalah kemiskinan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja apabila kita lihat dipinggir jalan sering terlihat anak-anak kecil meminta-minta, banyak para pengemis dan pengamen. Hal tersebut mereka lakukan karena suatu keadaan ekonomi yang kurang mencukupi bagi kehidupan mereka. Itu semua memperlihatkan betapa besarnya masalah kemiskinan yang ada

di Indonesia. Biasanya beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok tertentu. Kaum wanita pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan. Apabila dalam keadaan rumah tangga miskin, maka kaum wanitalah yang menanggung beban kerja yang lebih berat dari pada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak, mereka juga menjadi korban akibat tidak adanya pemerataan dan kualitas hidup masa depan mereka terancam oleh karena tidak tercukupinya gizi, pemerataan, kesehatan, serta pendidikan.

Menurut Bappenas (2002), kemiskinan adalah suatu situasi dan kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Bank Dunia (1990) mendefinisikan kemiskinan adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US\$ 1 per hari. Bank Dunia juga menyebutkan bahwa dimensi kemiskinan adalah politik, sosial dan budaya, psikologi, ekonomi dan akses terhadap aset. Dimensi-dimensi tersebut saling berkaitan dan saling mengunci atau membatasi. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

Menurut Kartasmita (1997:234) kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Sedangkan menurut BradLey (dalam Ala, 1981:4) kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan.

Karakteristik seperti yang disebutkan diatas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki kearah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberadaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan guna membangun organisasi masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah bagi perjuangan kaum miskin yang mandiri, berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka, dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang bersifat lokal, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong penurunan angka kemiskinan. Kemiskinan tertinggi atau yang berada di zona merah sebagian besar berada di wilayah utara Jawa Timur dan Pulau Madura yang berstruktur perekonomian subsisten. Merlin Dwi Yunaniar Analisis Ekonomi KPw Bank Indonesia Wilayah IV mengatakan, indeks pembangunan manusia (IPM)

berpengaruh secara negatif pada peningkatan kemiskinan."Kualitas pendidikan dan kesehatan yang tinggi terbentuk pada indeks komposit IPM maka modal untuk mengakses perekonomian menjadi lebih mudah sehingga kemiskinan dapat ditekan," kata Merlin dalam Seminar Economic Speaker Series di Gedung De Javasche Bank Surabaya, Selasa (29/4/2014). Beberapa wilayah yang berada dalam zona merah dengan IPM rendah dan angka penduduk miskin tinggi, kata dia (Merlin), yakni daerah Sampang, Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, Probolinggo, Situbondo, dan Bondowoso. Daerah yang termasuk dalam zona hijau dengan IPM tinggi dan angka penduduk miskin rendah yakni Surabaya, Malang, Madiun, Batu, Mojokerto, Blitar, Kediri, dan Sidoarjo. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kualitas SDM yang rendah dan tingginya tingkat kemiskinan sebagian besar ada di wilayah Madura.

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh setiap negara terutama negara-negara yang sedang berkembang. Adanya pembangunan di segala bidang merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pada prinsipnya pembangunan mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Banyak program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah guna menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia namun berbagai program pemerintah tersebut dapat dikatakan tidak memuaskan dan kurang mengena terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Mubyarto dalam bukunya "Strategi Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Dalam Kemiskinan Dan Kesenjangan Di Indonesia",

kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam program-program tersebut diantaranya:

Pertama, menyangkut orientasi program yang bersifat jangka pendek seperti pembagian sembako dan program padat karya. Program-program seperti ini memang sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi durasi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan program-program seperti ini sangatlah singkat dan sekali habis. Artinya bahwa kemungkinan kelanjutan pelaksanaan program-program seperti ini masih simpang siur dan tidak ada respon dari masyarakat untuk berinisiatif memberdayakan dirinya sendiri bahkan dalam pelaksanaanyapun kadang berimplikasi negatif. Hal ini dikarenakan kurangnya kontrol dan transparansi dari pelaksanaan program seperti ini sehingga seringkali memunculkan tindakan-tindakan penyelewengan.

Kedua, terkait dengan pemilihan kelompok-kelompok sasaran yang acap kali kurang tepat. Seharusnya pemilihan kelompok-kelompok sasaran penerima manfaat program dilakukan oleh pihak yang benar-benar mengetahui situasi dan kondisi lingkungan serta masyarakat miskin dalam suatu wilayah sehingga pelaksanaan program dapat sesuai dengan sasaran dan hasil yang diharapkan. Dalam banyak kasus terjadi kesalahan dalam penetapan siapa yang berhak memilih kelompok sasaran. Seperti implementasi program yang dilaksanakan melalui satuan administratif desa dan kelurahan. Pelaksanaan program ini cenderung mengabaikan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang sebenarnya lebih tahu situasi dan kondisi lingkungan yang ada, dan kelompok-

kelompok masyarakat tersebut tidak tergabung dalam satuan administrasi desa dan kelurahan.

Ketiga, merupakan kelemahan yang perlu diperhatikan lebih rinci dikarenakan paling penting bila dibandingkan dengan kelemahan-kelemahan yang lain, yaitu program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masih kurang dan bahkan tidak sama sekali melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai kelompok sasaran dan masih terlihatnya kearogansian pemerintah yang merasa paling bisa, paling tahu, dan paling paham terhadap apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dan bagaimana cara menolong mereka.

Lebih lanjut dalam program pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, ditetapkan suatu kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan-pelaksanaan program-program terdahulu yang dinilai kurang berhasil. PNPM-MP adalah suatu program penanggulangan kemiskinan yang beraspek pada proses pemberdayaan masyarakat. Program PNPM-MP ini memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan dan diberikan secara personal atau keluarga. Dana bantuan PNPM-MP tersebut merupakan dana pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan, serta pengembangan sumberdaya manusia. Dana yang dialokasikan untuk masyarakat dalam proyek ini terbagi menjadi tiga (3) yaitu :*Pertama*, berupa dana bantuan secara bergulir dengan bunga rendah yang biasanya digunakan sebagai modal

usaha. *Kedua*, dana hibah untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan untuk menciptakan adanya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. *Ketiga*, dana bantuan hibah yang digunakan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan teknis dan manajerial atau semacam kursus. Hakekat penyaluran-penyaluran dana ini adalah sebagai stimulan dan pemberi semangat agar masyarakat miskin dapat kreatif, inovatif, dan mempunyai keinginan untuk maju dengan mengembangkan suatu usaha sehingga secara ekonomis mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Pelaksanaan PNPM-MP sebagai program penanggulangan kemiskinan di perkotaan mempunyai sasaran perorangan ataupun keluarga miskin yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintah di tingkat kota dan wilayah administrasi pemerintah tersebut yang dinamakan kelurahan. Dalam pelaksanaan PNPM-MP di tingkat kelurahan dibentuk suatu badan sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang bertugas memfasilitasi partisipasi masyarakat sehingga dalam program ini diharapkan masyarakat miskin bisa berpartisipasi aktif dengan membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Badan yang dibentuk adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, warga, serta perwakilan kelompok swadaya masyarakat.

Salah satu kelurahan yang menjadi sasaran pelaksanaan program PNPM-MP ini adalah kelurahan Parteker dimana kelurahan Parteker termasuk wilayah yang padat penduduknya dengan heterogeni profesi, pekerjaan, tingkat pendidikan, maupun tingkat sosial. Secara umum baik BKM di kelurahan Parteker maupun BKM di kelurahan lain mempunyai dua tujuan yang terbagi atas waktu

yaitu *Jangka panjang* dan *Jangka pendek*. *Jangka panjang* sebagai wadah bagi proses pengambilan keputusan tertinggi di tingkat masyarakat yang memiliki tugas dan misi menangani berbagai persoalan kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. *Jangka pendek* sebagai badan yang bertanggungjawab untuk membahas, menyusun prioritas pendanaan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam perguliran dananya. Selain itu BKM juga berfungsi sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan program di tingkat kelurahan.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak mulai berjalannya program PNPM-MP pada BKM di kelurahan Parteker, secara kasat mata terlihat bahwa keberadaan serta pelaksanaan program PNPM-MP belum mampu membawa perubahan secara signifikan terhadap tingkat ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan belum optimal dan belum adanya perubahan signifikan terhadap ekonomi masyarakat sehingga perlu dilakukan suatu penelitian di BKM kelurahan Parteker dalam kaitannya terhadap program PNPM-MP sebagai media informasi, analisis, dan evaluasi.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan teori di atas penulis dapat menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan?

2. Apakah faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berpedoman pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pemberdayaan masyarakat, khususnya di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan.

D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

Secara Akademis

- a. Dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara khusus kepada peneliti atau secara umum kepada masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti dan mengkaji mengenai pemberdayaan masyarakat.

Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah yang bekerja sama dengan masyarakat terutama dalam pelaksanaan pemberdayaan di Kelurahan Parteker agar lebih optimal.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengenai pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Parteker.

E. Sistematika Penulisan

Dengan adanya urutan sistematika penulisan, maka diharapkan para pembaca akan mudah untuk memahami maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi. Adapun urutan yang ada di dalam skripsi dipaparkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai alasan peneliti yang melatarbelakangi pengambilan penelitian pada “Program Penanggulangan Masyarakat Miskin Perkotaan Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat” dimana program ini merupakan intervensi lanjutan dari Program P2KP yang diberikan kepada BKM Kelurahan Parteker untuk menciptakan desa yang berdaya dan mandiri.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian, pandangan serta teori dalam bahan penelitian pada judul skripsi yang

terdiri dari (1) Penanggulangan Kemiskinan Dalam Konteks Administrasi Pembangunan yang terdiri atas Definisi Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan (2) Teori Pemberdayaan yang terdiri atas, Pengertian Pemberdayaan, Strategi Pemberdayaan, Tujuan Pemberdayaan, Tahapan Pemberdayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat (3) Penjelasan Mengenai Konsep Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM-MP).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai berbagai metode penelitian, mulai dari jenis penelitian yang memakai metode deskriptif, pendekatan kualitatif, fokus penelitian yang menyesuaikan dengan rumusan masalah, lokasi dan situs penelitian yang bertempat di BKM Kelurahan, sumber data yang ada di dalam penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti mengemukakan cara penulis untuk mengelompokkan data yang nantinya dianalisa dengan metode analisa Miles, Huberman dan Saldana

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan deskripsi mengenai wilayah penelitian dengan data yang diperoleh penulis pada lokasi dan situs penelitian, baik itu data primer maupun sekunder.

Dalam hal ini terbagi menjadi tiga bagian, (1) penjelasan mengenai gambaran umum atas lokasi dan situs penelitian atas Kabupaten Pamekasan dan Kelurahan Parteker. (2) memberikan penjelasan atas hasil dan fokus penelitian mengenai proses pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Parteker, Peran Multi Aktor yang terlibat dalam melaksanakan program nasional pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Parteker, dan faktor penghambat dalam mensukseskan program nasional pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Parteker. (3) penjelasan atas hasil analisis dan pembahasan yang berdasarkan atas fokus penelitian mengenai pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Parteker, Peran Multi Aktor yang terlibat dalam melaksanakan program nasional pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Parteker, dan faktor penghambat dalam mensukseskan program nasional pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Parteker.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan – kesimpulan yang telah diperoleh dari pembahasan dan hasil penelitian mengenai “Proses Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kelurahan Parteker”. Di dalam kesimpulan dijelaskan pokok – pokok penting mengenai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM-MP) dan juga dalam bagian ini disampaikan pula saran – saran yang nantinya dapat digunakan untuk pertimbangan maupun perbaikan pada proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanggulangan Kemiskinan dalam Konteks Administrasi Pembangunan

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problem yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Upaya pemecahan masalah kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini sedang dilaksanakan. Istilah kemiskinan sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang asing dalam kehidupan kita. Kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan ditinjau dari segi materi (ekonomi). Dari kegagalan dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan secara berarti, maka para ahli kemudian bergeser dari penciptaan lapangan kerja yang memadai, penghapusan kemiskinan, dan akhirnya penyediaan barang-barang dan jasa kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk.

Dalam proses penanggulangan kemiskinan tentu ada banyak aspek yang menjadi acuan, salah satunya adalah administrasi publik.

1. Administrasi Publik
 - a. Definisi Administrasi Publik

Banyak para ahli memberikan definisi atau pengertian pada Administrasi Publik, antara lain sebagai berikut :

Menurut Nigro bersaudara yang dikutip oleh Syafiie (2006:24) mengemukakan :

- 1) Administrasi publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintah
- 2) Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan : eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan di antara mereka.
- 3) Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses-proses politik.
- 4) Administrasi publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Secara singkat menurut Dwight Waldo yang dikutip oleh Syafiie (2006:25) Administasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Berbeda dengan Erdward H. Litchfield yang dikutip oleh Syafiie (2006:25) mengemukakan administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Berdasarkan beberapa pengertian administrasi publik yang di kemukakan oleh beberapa ahli dapat di ambil kesimpulan bahwa pada intinya administrasi publik adalah kegiatan yang di laksanakan oleh sekelompok orang (masyarakat)atau lembaga pemerintah yang ada pada sebuah negara yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan memecahkan masalah-

masalah yang ada di dalam masyarakat dengan cara melakukan kebijakan publik atau membuat program yang efektif, efisien, dan ekonomis serta dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat.

b. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Secara umum administrasi publik dipersepsikan sebagai “*The Work of Government*”, dimana memiliki andil atau peran yang sangat vital bagi suatu negara. Hal tersebut senada dengan Karl Polanyi dalam Keban (2004:15) yang berpendapat bahwa kondisi ekonomi suatu negara tergantung pada kepada dinamikan administrasi publik. Selain itu peran administrasi publik juga dapat dilihat dari pernyataan Walter Weil dalam Keban (2004:15) yang mengemukakan bahwa pemerintah dapat menyengsarakan rakyat jika menerapkan administrasi publik dengan gaya “*Shadow Democracy*” artinya bahwa istilah tersebut menggambarkan hanya orang-orang kaya sajalah yang terus memerintah seolah-olah mempunyai hak istimewa, sehingga administrasi publik dapat menyengsarakan rakyat banyak khususnya rakyat kecil atau miskin.

Sebaliknya Frederick A. Cleveland masih dalam Keban (2004:15) menerangkan bahwa peran administrasi publik sangatlah vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Menurutnya bahwa administrasi publik perlu diadakan untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pemerintah perlu menerapkan teknik efektifitas dan efisiensi, dengan demikian akan lebih memberikan manfaat yang positif manakala pemerintah dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian tugas atau tanggung jawab dari administrasi tersebut sehingga akan terbentuk apa yang disebut "*Organized Democracy*" artinya terminologi ini menunjukkan bahwa demokrasi harus diorganise sedemikian rupa sehingga peran masyarakat dalam menyelenggarakan negara dapat diperluas yaitu ikut ambil bagian dalam menangani sektor publik, dan masyarakat tidak hanya sekedar ikut berpartisipasi secara konvensional dalam pemilu akan tetapi juga dalam pengambilan keputusan.

Gray dalam Pasolong (2007:8), menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut:

- a) Administrasi Publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan,
- b) Administrasi Publik melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia,
- c) Administrasi Publik berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi itu dari generasi ke

generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan perubahan jaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi, dan selaras dengan budaya lain di lingkungannya.

Ruang lingkup dari administrasi publik memang cukup luas dan kompleks, hal tersebut tergantung pada perkembangan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Nicholas Henry (1995) dalam Pasolong (2007:19) memberikan rujukan tentang ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas, antara lain adalah:

- a) Organisasi publik, pada dasarnya berkenaan dengan model- model organisasi dan perilaku organisasi;
- b) Manajemen publik, yakni berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia;
- c) Implementasi, yakni menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Selain itu Chandler dan Plano (1998:3) dalam Keban (2004:8) mengemukakan bahwa apabila kehidupan manusia menjadi semakin kompleks permasalahannya maka apa yang dikerjakan oleh pemerintah atau administrasi publik juga semakin kompleks.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya dari pembangunan, dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tentu saja administrasi pembangunan merupakan salah satu dari sekian aspek pembangunan.

2. Administrasi Pembangunan

a. Definisi Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan menurut Tjokrowinoto dalam Suryono (2001:21) berkesimpulan bahwa beberapa defininisi pembangunan sebagi citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- b. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
- c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
- d. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep *transcendental*, sebagai *metadisciplinar*, bahkan memperoreh bentuk sebagai ideologi yaitu *phenomenon the ideology of developmenalism*.
- e. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara seakin meningkat.

f. Pembangunan menjadi *culture specific*, *situation specific* dan *time specific*.

b. Paradigma pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya (1982:1) bahwa “*Development concept is not a static concept continously changing*” yang artinya pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep yang statis, sehingga pembangunan harus mengikuti perkembangan zaman dan menitikberatkan pada perbaikan kualitas serta tingkat hidup masyarakat, agar lebih baik dari keadaan sebelumnya. Seharusnya pembangunan mampu mengatasi masalah kemiskinan bukan malah membuat permasalahan kemiskinan menjadi semakin parah.

Paradigma diartikan sebagai pola atau model cara pandang terhadap suatu masalah atau persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi, teori, metode dan pemecah masalah tertentu.

Beberapa paradigma pembangunan menurut Tjokrowinoto (1995:218) adalah sebagai berikut:

1. *Growth Paradigm* (paradigma pertumbuhan)

Pada dasawarsawa pertama tahun 1960-1970 adanya keinginan untuk menciptakan kemajuan dibidang ekonomi dan strategi pertumbuhan ekonomi negara berkembang sekitar 5% pertahun. Ironisnya pendekatan ini membuat negara negara berkembang justru kandas di tengah jalan pardiigma ini lebih

menonjolkan infrastruktur fisik yang justru memunculkan ketimpangan sosial ekonomi secara meluas. Pertumbuhan pendapatan tidak disertai dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Masyarakat miskin hanyalah menerima sebagian kecil dari efek pertumbuhan ekonomi sedangkan kaum pemilik modal yang menguasai sebagian akses yang ada, sehingga persoalan kemiskinan menjadi semakin parah, pengangguran di mana-mana, tingkat kemiskinan semakin tinggi.

Melihat kenyataan bahwa kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat semakin parah maka terjadilah pergeseran dari pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya timbul pemikiran paradigma baru yaitu:

2. *Welfare paradigm* (paradigma kesejahteraan)

Pada periode dasawarsa pembangunan kedua (1971-1989) pelaksanaan pembangunan (*Growth and Equity of Strategy Development*) menuju industrialisasi dengan pertumbuhan sebesar 6% pertahun. Dengan tujuan pemerataan pembangunan di bidang pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan, kewirausahaan, keamanan, kesejahteraan sosial termasuk pelestarian dan penyelamatan lingkungan dari kerusakan. Dalam paradigma ini ternyata belum mampu merubah ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Hal tersebut ditandai dengan ketergantungan investasi, bantuan dan pinjaman luar negeri.

Pelaksanaan pembangunan dalam paradigma ini ternyata cenderung bersifat sentralistik (*Top-Down*) sehingga menunjukkan ketergantungan

antara rakyat dan proyek pembangunan (birokrasi pemerintah). Permasalahan kemiskinan dalam paradigma ini semakin parah karena masyarakat tidak dilibatkan di dalamnya, tidak dijadikan sebagai subyek malah seakan-akan masyarakat tidak mandiri. Hal ini membahayakan kelanjutan proyek pembangunan. Karena pembangunan sifatnya tidak menumbuhkan pemberdayaan (*disempowering*) rakyat dan dianggap tidak berhasil dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan kemiskinan yang ada. Oleh karena itu, muncul gagasan baru untuk menjamin kelanjutan pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

3. *Sustainable Development paradigm* (paradigma pembangunan berkelanjutan)

Hasil pembangunan yang tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat telah mengkondisikan ketimpangan dan ketergantungan berkepanjangan. Kendati sudah sangat terlambat pemerintah mulai menengok paradigma baru yaitu paradigma pembangunan berkelanjutan. Konsep paradigma ini adalah konsep pembangunan ramah lingkungan dimana pembangunan ini perpaduan bagaimana melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat suatu negara dengan sumberdaya yang dimiliki sekaligus mempertahankan kelangsungan generasi selanjutnya.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam paradigma pembangunan ini adalah adanya kenyataan kebutuhan masyarakat miskin berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan keterbatasan sumberdaya, teknologi, dan kemampuan organisasi sebagai penopang disisi lain. Di Indonesia

pembangunan nasional yang berkelanjutan hanya menjadi slogan kebanggaan dan bukan menjadi realitas. Aktivitas produksi dalam rangka menggenjot perekonomian masih terus dilaksanakan dengan mengorbankan masyarakat miskin atau golongan lemah, hal ini terlihat dengan masih banyak pembangun yang dilakukan tanpa memikirkan dampaknya terhadap ekologi, misalnya semakin sempitnya lahan pertanian untuk industri.

4. *Human Development Paradigm*

Belajar dari pengalaman lalu maka mulai tahun 1990-an diadopsikan paradigma baru yang lebih bersifat humanize. Terjadinya kegagalan tersebut telah menyadarkan akan perlunya reorientasi baru dalam paradigma pembangunan. Bermula dari pengalaman lalu, maka paradigma pembangunan lebih memperhatikan lingkungan dan lebih manusiawi. Oleh karena itu, paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai faktor kunci untuk memainkan peranan penting dalam segala segi. Paradigma pembangunan sebelumnya lebih bersifat elitis daripada populis sehingga pembangunan lebih memihak kepada kaum elit daripada kaum lemah.

Dalam proses penanggulangan kemiskinan tentu salah satu upaya yang pasti dilakukan adalah pemberdayaan, pemberdayaan pasti menjadi pilihan utama dalam mengatasi kemiskinan, dikarenakan melibatkan langsung faktor penyebab kemiskinan, yaitu masyarakatnya sendiri.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus dapat mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dalam bahasa inggris adalah empowerment. Kata power dalam empowerment diartikan sebagai “daya” ditambah awalan pe- dan akhiran – an menjadi pemberdayaan. Daya dalam bahasa Indonesia berarti kekuatan yang berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur – unsur penguatan yang diserap dari luar. Pemberdayaan dalam berbagai literatur dipandang sebagai sebuah proses dan sekaligus sebuah tujuan. “Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu – individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat.” (Indrawijaya dan Pranoto, 2011 : 60)

Menurut Sumodiningrat (1999 : 129) pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Sedangkan menurut Sulistiyani (2004 : 79) Pemberdayaan mempunyai definisi yakni “Merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap dimana harus

dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu untuk mandiri.”

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu wujud yang dilakukan oleh pihak – pihak tertentu yang melakukan pemberdayaan secara bertahap agar mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri dalam proses peningkatan taraf hidup. Pemberdayaan merupakan suatu pijakan bagi suatu kelompok masyarakat untuk bisa lebih menggunakan kemampuan disekitar, baik itu Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan penggunaan potensi di sekitar secara maksimal nantinya masyarakat dapat merencanakan sendiri akan kebutuhan – kebutuhan di sekitar lingkungannya, baik itu kebutuhan pembangunan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2. Strategi Pemberdayaan

Teknik – teknik pemberdayaan pada saat ini diperlukan oleh pemerintah, terlebih lagi dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Banyak program – program pemerintah yang dahulu mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan, pemerintah tidak pernah mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program – program pembangunan, khususnya program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Usaha – usaha pelaksanaan program pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan (5P). Menurut Suharto (1997 : 95) usaha tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat – sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok – kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas – tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dijelaskan oleh Suharto (2006 : 66) pada umumnya proses pemberdayaan dilakukan secara kolektif. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi inipun tetap berkaitan dengan kolektivitas dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dimana pemberdayaan dapat dilakukan melalui azas pemberdayaan, yaitu :

1. Azas Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling, stress management, crisis intervention. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).

2. Azas Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan menggunakan kelompok lain sebagai media intervensi melalui pendidikan dan pelatihan serta dinamika kelompok.

3. Azas Makro

Disebut juga sebagai strategi sistem besar (large system strategy) karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi – situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa dalam melakukan suatu bentuk pemberdayaan diperlukan adanya suatu tahapan – tahapan dalam proses pengenalan, penguatan, sampai dengan pembimbingan atas pemberdayaan yang dilakukan. Dengan adanya bentuk strategi di dalam pelaksanaan pemberdayaan diharapkan pihak – pihak pelaksana, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat sebagai penerima bantuan dapat saling bersinergi dalam kegiatan pemberdayaan. Hal ini dikarenakan kapasitas dari masing – masing pihak yang terbatas, sehingga dengan adanya strategi dalam menjalankan pemberdayaan dapat saling mengisi dan membuat kegiatan pemberdayaan berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Tujuan Pemberdayaan

Proses pelaksanaan pemberdayaan di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu diharapkan mempunyai bobot untuk dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat menjadi terangkat dan posisinya tidak lagi dikatakan sebagai masyarakat pra – sejahtera. Pada konteks pemberdayaan, suatu program memiliki sasaran pencapaian tertentu untuk memberikan dampak kepada masyarakat melalui tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam hal ini Sulistiyani (2004 : 80) menjelaskan mengenai tujuan dari adanya pemberdayaan terhadap masyarakat.

“Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta

melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah – masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.”

Dalam kaitannya dengan tujuan pemberdayaan, dalam mencapai kemandirian diperlukan sebuah proses belajar secara bertahap yang nantinya akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu. Nantinya akan terakumulasi kemampuan masyarakat untuk mengantarkan menuju kemandirian, dan diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Sulistiyani, 2004 : 81 - 82). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Montago dan Matson dalam Suprijatna (2000 : 64 – 65) yang dikutip oleh Sulistiyani (2004 : 81) dalam *The Dehumanization of Man* yang mengusulkan konsep *The Good Community and Competency* yang meliputi sembilan konsep komunitas yang baik dan empat komponen kompetensi masyarakat, diantaranya adalah :

1. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi, adanya kelompok juga kelompok primer.
2. Komunitas memiliki otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab.
3. Memiliki viabilitas, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri.
4. Distribusi kekuasaan merata sehingga setiap orang berkesempatan riil, bebas memiliki dan menyatakan kehendaknya.

5. Kesempatan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk kepentingan bersama.
6. Komunitas memberi makna kepada anggota.
7. Adanya heterogenitas dan beda pendapat.
8. Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang berkepentingan.
9. Adanya konflik dan managing conflict.

Sedangkan untuk melengkapi komunitas yang baik, perlu ditambahkan kompetensi sebagai berikut :

1. Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas.
2. Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas.
3. Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui.
4. Mampu bekerjasama rasional dalam bertindak mencapai tujuan.

Pemberdayaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang mengarahkan seseorang atau kelompok masyarakat untuk bisa berlaku secara mandiri dalam prose peningkatan taraf hidup seseorang atau kelompok. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah untuk mengajarkan kepada kelompok masyarakat agar mampu menggunakan pemikirannya untuk bisa menggali potensi yang ada disekitarnya dan kemudian mengembangkan potensi tersebut berdasarkan kesepakatan bersama dalam rangka mencapai

masyarakat yang berdaya dan mewujudkan komunitas masyarakat yang ideal sesuai dengan cita – cita bersama.

4. Tahapan Pemberdayaan

Di dalam pemberdayaan terdapat tahapan atau proses agar upaya pemberdayaan sesuai dengan harapan dan cita – cita, baik itu pemerintah maupun masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Menurut Pranarka dan Vindhyanika, (1996) yang dikutip oleh Prasojo (2004 : 12) memberikan penjelasan mengenai tahapan pemberdayaan, yakni ;

“Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu merupakan proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekankan pada proses memberikan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada individu atau masyarakat agar lebih berdaya, dimana proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kemudian proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder menekankan pada menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan melalui proses dialog.”

Kemudian dalam proses belajar untuk mencapai kemandirian di dalam pemberdayaan, Sulistiyani (2004 : 82 – 83) memberikan penjelasan mengenai tahapan – tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan.

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahapan pemberdayaan merupakan suatu pijakan yang diambil untuk menuju proses pemberdayaan yang seutuhnya. Dimana dalam hal ini diperlukan adanya bimbingan dan pengarahannya secara berkelanjutan dari pihak – pihak yang mendukung kegiatan pemberdayaan agar perilaku dan kemampuan masyarakat dapat terus terpelihara yang nantinya dapat berkembang sesuai dengan kondisi riil di wilayahnya. Dengan demikian, keberhasilan dari proses pemberdayaan kepada masyarakat dapat dinilai dari seberapa besar tahapan pemberdayaan diterapkan kepada masyarakat sebagai sasaran dari program pemberdayaan.

5. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Penjelasan mengenai pemberdayaan masyarakat hingga kini sifatnya luas dan banyak para ahli berpendapat dengan pandangannya masing – masing. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan suatu proses memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat agar bisa berdaya dan mandiri melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam hal ini, Sulistiyani (2004 : 79) memberikan penjelasan mengenai pemberdayaan masyarakat.

“Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Disamping itu, pemberdayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (charity), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.”

Menurut Prasojo (2004 : 12) terdapat beberapa hal penting untuk membuat definisi dari pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberi kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (powerless) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.
2. Terdapat dua kecenderungan yang saling terkait dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat. Pertama kecenderungan primer menekankan pada proses memberikan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada individu atau masyarakat agar lebih berdaya. Kedua kecenderungan sekunder menekankan pada menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan melalui proses dialog.
3. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan antara lain ; pemberdayaan bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya, bidang ekologi, dan pemberdayaan bidang spiritual.
4. Pemberdayaan masyarakat agar dapat dilihat sebagai program maupun proses. Sebagai program, pemberdayaan dilihat sebagai tahapan – tahapan kegiatan yang biasanya telah ditentukan jangka waktu pencapaiannya. Sedangkan sebagai proses, pemberdayaan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan.

5. Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat atau masyarakat menjadi pilihan yang paling menguntungkan di masa yang akan datang.
6. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada manusia (community based development).

Menurut Kartasmita dalam Prasajo (2004 : 14) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat terkait dengan keberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik kuat, dan inovatif tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Keberdayaan masyarakat adalah unsur – unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah kegiatan untuk membuat masyarakat menjadi mampu dan mandiri dalam meningkatkan taraf hidup melalui penggalian potensi wilayah dan pemetaan perencanaan pembangunan sampai dengan pelaksanaan pembangunan untuk jangka panjang.

Definisi pemberdayaan dalam arti sempit, yang berkaitan dengan sistem pengajaran antara lain dikemukakan oleh Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata "empower" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (*skill*) ataupun pengetahuan (*knowledge*). Seseorang tokoh pendidikan Paulo Freire, berpendapat bahwa pendidikan seharusnya dapat memberdayakan dan membebaskan para peserta didiknya, karena dapat mendengarkan suara dari peserta didik. Yang dimaksud suara adalah segala aspirasi maupun segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut.

Pranarka dan Moeljanto (1996) menjelaskan konsep pemberdayaan (*empowerment*) dilihat dari perkembangan konsep dan pengertian yang disajikan dalam beberapa catatan kepustakaan, dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman konsep dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat. Perlu upaya mengaktualisasikan konsep pemberdayaan tersebut sesuai dengan alam pikiran dan kebudayaan Indonesia. Namun *empowerment* hanya akan mempunyai arti kalau proses pemberdayaan menjadi bagian dan fungsi dari kebudayaan,

baliknya menjadi hal yang destruktif bagi proses aktualisasi dan koaktualisasi aksestensi manusia. Pada intinya pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya. (Priyono dan Pranaka, 1996: 2-8).

Pemberdayaan dilakukan untuk mengentas kemiskinan yang terjadi, kemiskinan tidak datang begitu saja, banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, banyak jenis kemiskinan yang ada di Indonesia, berikut dijabarkan mengenai kemiskinan tersebut.

6. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Definisi mengenai kemiskinan sangat beragam mulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hingga definisi kemiskinan dengan mempertimbangkan komponen sosial dan moral. Kemiskinan dapat diartikan suatu kondisi serba kekurangan. Kemiskinan juga dapat dicirikan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan, dan pakaian, tingkat pendapatan rendah, pendidikan dan keahlian rendah, keterkucilan sosial karena keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Singkatnya, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar hidup yang rendah yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah

atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan,1984).

Kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional artinya kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomi tapi juga dapat dilihat dari segi sosial, budaya, dan politik. Definisi kemiskinan ini semakin berkembang sesuai dengan penyebabnya. Papilaya (2006) mengemukakan bahwa pada awal 1990-an definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan tetapi mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan. SMERU dalam Krisnamurti (2006) menyebutkan definisi kemiskinan yang memadai harus mencakup berbagai dimensi, antara lain :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan).
2. Ketidakmampuan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
3. Tidak ada jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual dan massal.
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumberdaya alam.
6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita tindak kekerasan rumah tangga, janda, kelompok marginal dan terpencil).

Pengertian tersebut sesuai dengan konsep Chambers (1983) tentang jebakan kemiskinan yang diacu dalam Mutaqien (2006), antara lain kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan dan ketidakberdayaan.

- b. Jenis Jenis Kemiskinan

Ukuran kemiskinan menurut Nurksedalam Kuncoro, (1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan

keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Kemiskinan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok sesuai dengan pemahaman atas kondisi kemiskinan yang dihadapi (Krisnamurthi, 2006), yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang terjadi bila seseorang, keluarga, atau masyarakat yang tingkat pendapatan atau pengeluarannya berada di bawah suatu batas minimal tertentu untuk dapat hidup layak sebagai manusia. Batas tersebut disebut garis kemiskinan.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang terjadi jika seseorang, keluarga, atau masyarakat yang tingkat pendapatannya atau pengeluarannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan atau pengeluaran masyarakat sekitarnya.

3. Kemiskinan Kronis (*chronic*)

Kemiskinan ini terjadi jika kondisi kemiskinan terjadi terus menerus dalam jangka waktu yang lama.

4. Kemiskinan Sementara (*transitory*) atau *accidental*

Kemiskinan ini terjadi akibat adanya perubahan atau “*shock*” yang mengakibatkan seseorang atau keluarga atau masyarakat berubah dari tidak miskin menjadi miskin.

5. Kemiskinan Masal

Kemiskinan ini terjadi jika sebagian besar dari masyarakat mengalami kemiskinan

6. Kemiskinan Individual

Kemiskinan yang terjadi jika hanya beberapa orang atau sebagian kecil masyarakat yang mengalami kemiskinan.

c. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp (dalam Kuncoro, 2006:120) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan

dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.

Dalam mengentas kemiskinan, banyak program program yang telah dilakukan pemerintah, namun tidak semua program berhasil secara signifikan mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian muncullah satu program yang

dicanangkan oleh pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat, yaitu PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan).

C. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah sejak 2007, sebelumnya yakni pada tahun 1999 program ini dikenal dengan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) (SNVT P2KP Pusat Kementerian PU, 2011). Melalui PNPM-MP, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengarahkan Pemerintah Daerah agar makin responsif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah masing-masing, sehingga Pemerintah Daerah menjadi mandiri dan mampu menciptakan masyarakat madani. Tujuan umum PNPM-MP adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja sementara tujuan khususnya adalah meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, kapasitas kelembagaan, kapasitas pelayanan pemerintah, sinergi masyarakat, keberdayaan dan kemandirian masyarakat, modal sosial masyarakat, dan meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna (Tim Pengendali PNPM, 2010). PNPM-MP memiliki strategi dasar berupa menciptakan pembangunan berkelanjutan dalam hal penanggulangan kemiskinan. Pembangunan berkelanjutan ini terwujud dengan cara memberi akses masyarakat miskin agar berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dari pembangunan permukiman di wilayahnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat kemampuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan masing-masing. (PNPM Mandiri, tt).

PNPM-Mandiri Perkotaan atau Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara mandiri.

PNPM-Mandiri Perkotaan merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. [Dikutip dari : Buku Pedoman Umum PK2P-3, Edisi Oktober 2005]

PNPM-Mandiri Perkotaan sebagai suatu ”proyek” merupakan suatu upaya pemerintah yang bermuara kepada ”program” penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan (empowerment) sebagai investasi modal sosial (social capital) menuju pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Artinya ”proyek” yang diprakarsai pemerintah ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi ”program” penanggulangan kemiskinan yang tumbuh atas inisiatif dan prakarsa masyarakat sendiri dan didukung oleh pemerintahnya maupun kelompok-kelompok peduli, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha yang ada.

Sejak tahun 1999, PNPM-Mandiri Perkotaan dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan struktural maupun upaya yang diakibatkan krisis ekonomi tahun 1997. PNPM-Mandiri Perkotaan dilaksanakan untuk mempercepat

upaya penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat akibat krisis ekonomi, tetapi juga bersifat strategis, karena dalam kegiatan ini perlu disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang kuat bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti antara lain :

- **Dimensi Politik** , sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi;

- **Dimensi Sosial** sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial;
- **Dimensi Lingkungan** sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;
- **Dimensi Ekonomi** muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan
- **Dimensi Aset**, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (*human capital*), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu

mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam 'melembagakan' dan 'membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan (nilai-nilai dan prinsip-prinsip di PNPM-MP), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kepada kelembagaan masyarakat tersebut yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya mengelola dana abadi PNPM-Mandiri Perkotaan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembung warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun *danawaqaf* bagi stimulan atas keswadayaan masyarakat untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana serta sarana dasar perumahan dan permukiman.

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman mereka maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan proses pemberdayaan masyarakat, yakni dengan kegiatan pendampingan intensif di tiap kelurahan sasaran.

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, PNPM-Mandiri Perkotaan cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan berpotensi sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh dan untuk masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang dalam prosesnya menggunakan teknik atau metode yang bersifat khusus untuk membedakan karya tulis lainnya. Dimana di dalam sebuah penelitian dibutuhkan adanya suatu metode – metode khusus untuk menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan penelitian. Adapun metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975 : 5) yang dikutip oleh Moleong (2004) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari keutuhan.

Kemudian jenis dari penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Nazir (2005 : 54) tujuan dari penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Alasan dipilihnya metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini didasarkan oleh dua hal, yaitu :

1. Metode ini dapat memberikan gambaran secara utuh atas suatu kondisi yang terjadi di lapangan antara peneliti dan informan.
2. Metode ini dapat menyesuaikan apabila terdapat suatu perubahan – perubahan yang terjadi di lapangan selama proses penelitian berlangsung.

Selain itu, penggunaan penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini dilakukan secara langsung terjun ke lapangan yang menjadi objek penelitian di Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Parteker Kota Pamekasan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, hasil yang akan diperoleh dari penelitian berdasarkan survey atau kenyataan di lapangan yang didapatkan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung dan hasil dari penelitian tersebut juga didapatkan melalui proses wawancara dari berbagai informan.

Dari penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti akan berusaha memberikan gambaran secara sistematis mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan”. Peneliti akan mencoba menjelaskan fakta dan realita yang terjadi di lapangan dengan dikaitkan teori – teori yang telah digunakan sebagai dasar penelitian, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan disusun dalam suatu bentuk penulisan yang sistematis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan suatu keadaan di lapangan serta informasi yang diperlukan. Lokasi penelitian yang lebih spesifik bertempat di Kecamatan Kota. Sedangkan yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah Kelurahan Parteker Kabupaten Pamekasan dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menangani Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

Pemilihan lokasi penelitian ini adalah didasarkan karena merupakan desa yang dirasa masih perlu pembenahan dan perhatian. Karena tingkat kemiskinan di kota tergolong cukup tinggi dan perlu adanya penanganan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam metode penelitian kualitatif yang berfungsi membatasi studi atau fokus penelitian dapat membatasi bidang-bidang (inquiry). Kemudian fokus penelitian diperlukan untuk memenuhi kriteria masukan dan keluaran, maka seseorang peneliti akan membuat keputusan yang tepat di dalam penelitiannya sehingga nantinya mengetahui data mana yang akan diambil dari data – data yang telah dikumpulkan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Dengan kata lain, walaupun rumusan masalah sudah cukup baik dan telah

dirumuskan, bisa terjadi situasi di lapangan tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti masalah tersebut. Dengan demikian, yang menentukan kepastian tentang fokus dan masalah adalah keadaan di lapangan (Moleong, 2004 : 94).

Berhubungan dengan topik penelitian mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan. Maka batasan fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan, yang meliputi :
 - a. Proses pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan.
 - b. Peran multi aktor dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan.
 - c. Dampak pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan
2. Faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984 : 47) yang dikutip oleh Moleong (2004 : 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata – kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain –

lain. Sumber data merupakan suatu kumpulan data yang yang dibutuhkan oleh peneliti di dalam sebuah lokasi penelitian yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara, maupun dokumen – dokumen yang terkait dengan proses penelitian. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka jenis dan sumber data terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok data primer dan kelompok data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut ;

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui subjek atau narasumber di sekitar lokasi penelitian, yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan serta penjelasan hambatan pelaksanaan pemberdayaan tersebut.
2. Data sekunder, merupakan model data tidak langsung yang digunakan untuk mendukung proses penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder berupa, dokumen – dokumen, arsip – arsip, data statistik maupun laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan di Kelurahan Parteker. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data maupun informasi yang berasal dari Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Parteker Kabupaten Pamekasan, Tim Teknis / Konsultan yang bernaung di Kantor PNPM Regional Kabupaten Pamekasan, Baik itu dokumentasi, laporan, maupun data – data lainnya yang berhubungan dengan

pemberdayaan masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam sebuah penelitian ilmiah. Hal ini dikarenakan data – data yang telah diperoleh diharapkan dapat memberikan suatu keterangan yang mengarah kepada jawaban untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam penelitian tersebut. Menurut Sugiyono (2012 : 63) dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participian observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi. Untuk memperoleh data – data yang diperlukan dalam penelitian, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengadakan proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber – narasumber yang dijadikan subjek penelitian. Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2012 : 72) dengan adanya wawancara, peneliti akan mengetahui hal – hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan dalam observasi.

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Parteker. Wawancara ini ditujukan kepada Penanggungjawab yang menangani pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

2. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera. Menurut Marshall dalam Sugiyono (2012 : 64) dengan adanya observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut, dimana proses pengamatan dilakukan untuk memperoleh data – data berdasarkan kenyataan di lapangan dengan melakukan pencatatan yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui secara langsung dan jelas terhadap kejadian yang terjadi di lapangan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang ditinjau dari perspektif pemberdayaan masyarakat.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai data seperti dokumen, arsip, buku, jurnal ilmiah, laporan yang mempunyai hubungan relevan dengan penelitian.

Dengan menggunakan teknik ini, peneliti melakukan pengarsipan terhadap sumber – sumber yang terdapat di lokasi dan situs penelitian. Seperti halnya data dalam bentuk tabel, draft, diagram, maupun gambar – gambar dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Dokumen / data yang diperoleh berasal dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Parteker.

F. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Taylor (1975 : 79) yang dikutip oleh Moleong (2004 : 280) sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu sendiri. Dengan kata lain, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini, digunakan model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari 4 komponen. Alur kegiatan analisa kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) meliputi:

1. Pengumpulan Data (*Data Display*)

Reduksi data yaitu laporan-laporan dalam bentuk uraian yang akan direduksi, dipilah-pilah hal yang pokok, dan fokus pada hal yang penting serta membuang hal yang tidak diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. reduksi data yang digunakan oleh

peneliti adalah mengumpulkan data-data tentang kepegawaian serta menganalisa data-data sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah pengelolaan data, sehingga akan memberakan perubahan wujud dari bentuk laporan- laporan sampai data tersebut siap disajikan.

3. Penyajian Data (*Data Collection*)

Penyajian data yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, sehingga disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data merupakan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data dimaksudkan agar mempermudah bagi penelitian pelihat gambaran secara keseluruhan atau biasa dikatakan menyederhanakan informasi dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

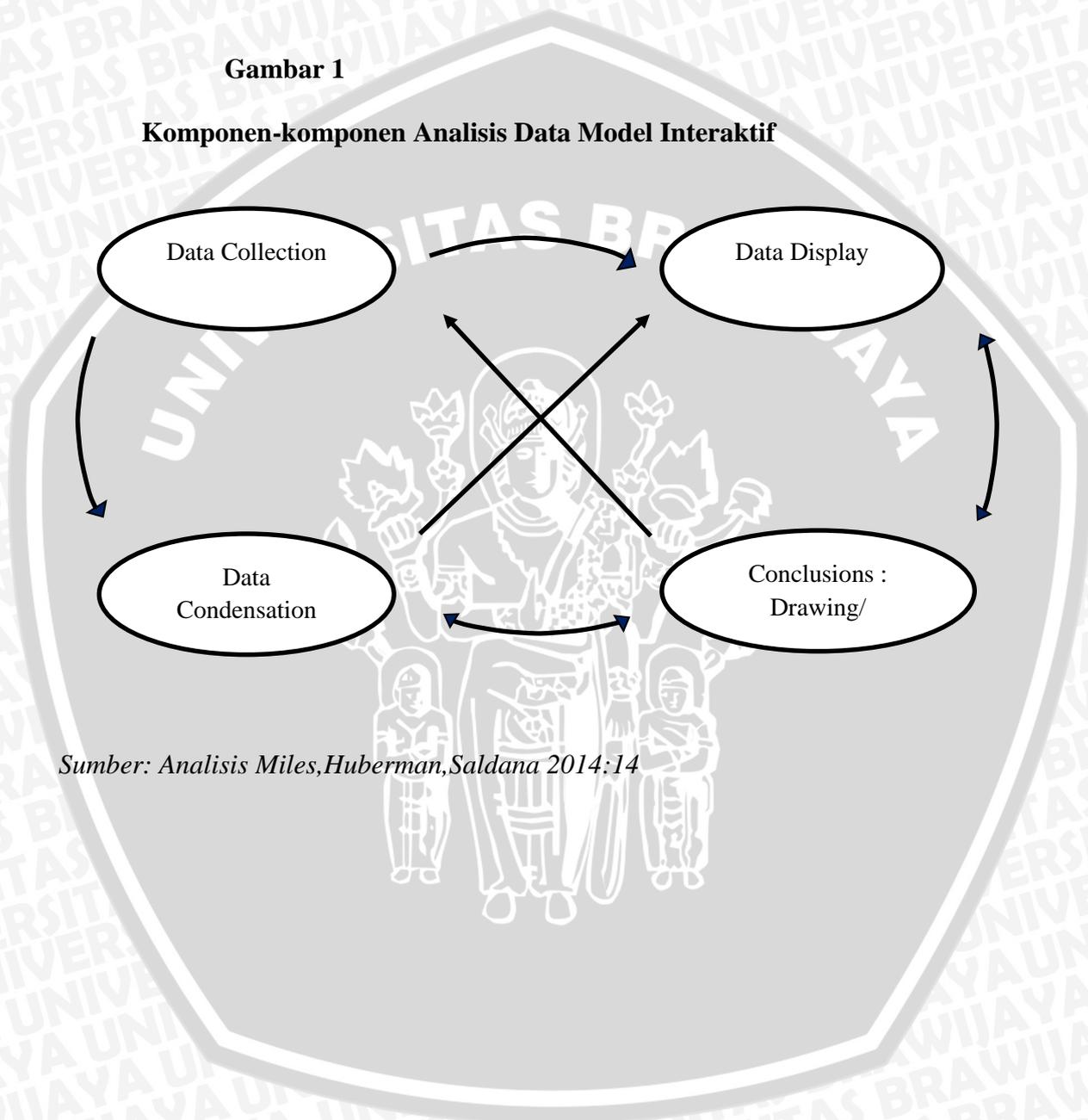
Verifikasi yaitu peneliti berusaha menggambarkan dari data yang dikumpulkan dan dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara. Verifikasi merupakan suatu rangkaian saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti dari data yang telah diolah kemudian di sajikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan uraian diatas dalam penyajian data, masalah reduksi, penyajian dan verifikasi data merupakan gambaran keberhasilan secara

berurutan sebagai rangkaian analisis. Sehingga dalam penulisan skripsi dapat lebih terarah, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1

Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Analisis Miles,Huberman,Saldana 2014:14

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan

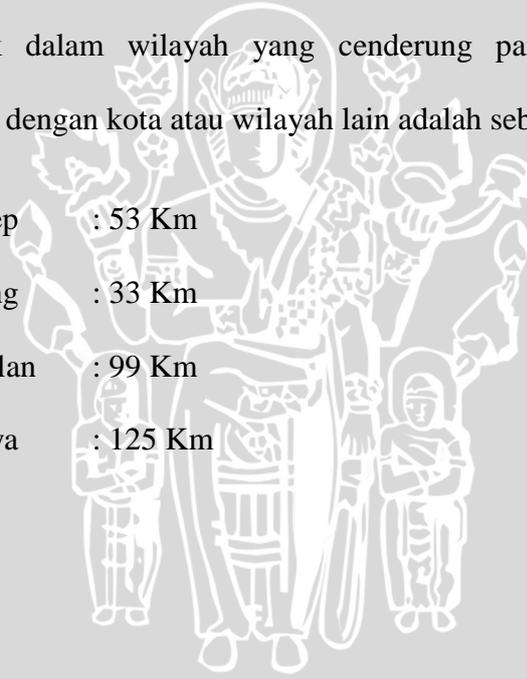
Kabupaten Pamekasan, terletak di Pulau Madura yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur dengan posisi geografis antara $6^{\circ}51' - 7^{\circ}13'$ LS dan $113^{\circ}19' - 113^{\circ}58'$ BT. Batas-batas daerahnya meliputi :

- a) Sebelah Utara : Laut Jawa
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Sumenep
- c) Sebelah Selatan : Selat Madura
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Sampang

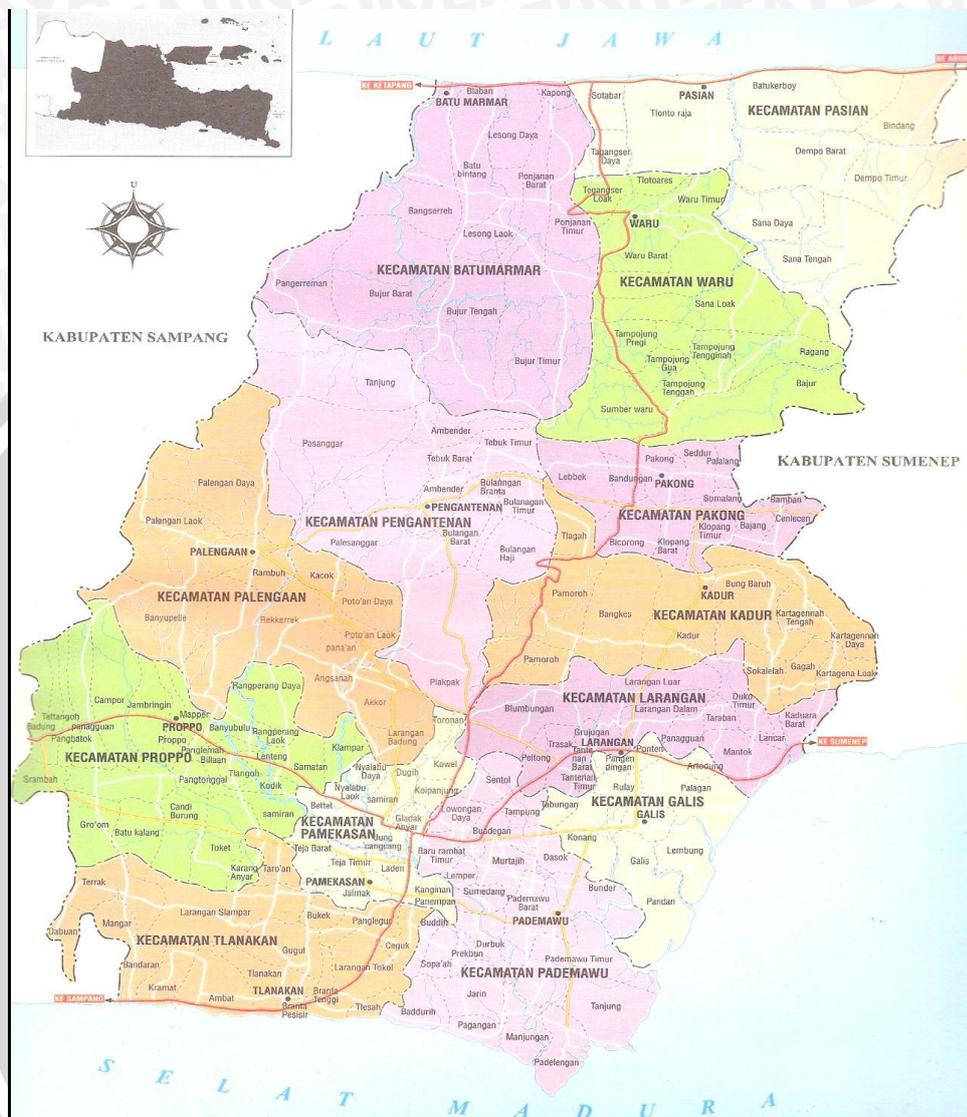
Dataran tertinggi di Kabupaten Pamekasan mencapai 350 meter dari permukaan laut dan yang terendah berada di Kecamatan Galis setinggi 6 meter. Seperti daerah lain di Indonesia, dalam satu tahunnya berlaku dua musim. Musim penghujan pada bulan Oktober – April dan musim kemarau bulan April – Oktober. Meskipun curah hujan dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan di Jawa, namun struktur tanahnya yang tidak kedap air menyebabkan sektor pertanian masih banyak berharap belas kasih sang hujan. Kondisi ini secara drastis akan menyebabkan kekurangan suplai air pada saat musim kemarau. Data

indikator iklim meliputi curah hujan dan hari hujan. Curah Hujan merupakan besarnya volume/intensitas air hujan dalam kurun waktu tertentu yang diukur dengan alat penakar hujan dengan satuan mm. Hari Hujan adalah suatu hari dimana terjadi hujan dalam satu tahun. Data curah hujan ditampilkan dalam bentuk intensitas curah hujan di setiap stasiun penakar hujan per bulan selama dalam kurun waktu satu tahun pengamatan. Temperatur rata-rata di Kabupaten Pamekasan adalah Maksimum 30° Celcius dan Minimum 28° Celcius. Kelembaban Udara Rata-Rata pada Kabupaten Pamekasan adalah 80% Sehingga Kabupaten Pamekasan Termasuk dalam wilayah yang cenderung panas. Jarak antara Kabupaten Pamekasan dengan kota atau wilayah lain adalah sebagai berikut :

- a) Sumenep : 53 Km
- b) Sampang : 33 Km
- c) Bangkalan : 99 Km
- d) Surabaya : 125 Km



Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan



Gambar 2. Peta Wilayah Pamekasan

Sumber : Pamekasan Dalam Angka 2013

Secara administratif, wilayah Pamekasan memiliki luas 79.230 Ha, dan terbagi menjadi 13 kecamatan yang meliputi 189 desa/kelurahan. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di pulau Madura yang memiliki wilayah teritorial daratan dan lautan.

a. Topografi

Secara umum Kabupaten Pamekasan yang memiliki luas wilayah $\pm 792,30$ Km², merupakan daerah dataran rendah pada bagian selatan dan utara, serta dataran tinggi pada bagian tengah. Di bagian utara mencakup Kecamatan Batumarmar dengan ketinggian 0 – 100 meter dan sebagian mencapai ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Pada bagian selatan wilayahnya relatif lebih datar, yang meliputi Kecamatan Tlanakan, Pademawu, dan Pamekasan, dengan ketinggian ± 50 meter di atas permukaan laut, kecuali di bagian barat daya yang meliputi wilayah Kecamatan Proppo sebagian wilayah Kecamatan Tlanakan ketinggiannya mencapai 250 meter di atas permukaan laut. Pada wilayah bagian tengah, merupakan perbukitan atau dataran tinggi dengan ketinggian hingga 477 meter di atas permukaan laut. Pembagian luas wilayah Kabupaten Pamekasan berdasarkan ketinggian dan kelerengan disajikan ada tabel berikut:

Tabel 1 :Luas Daerah Menurut Ketinggian

NO	KETINGGIAN TEMPAT	LUAS	
		Ha	%
1.	0 - 100 M	39.608	49.99
2.	101 - 500 M	39.622	50.01
3.	501 - 1000 M	-	-
JUMLAH		79.230	100.00

Sumber: http://pembangunanpamekasan.info/405_Kondisi_Geografis.gc

Tabel 2 :Luas Daerah Menurut Kelerengan

NO	KLASIFIKASI KELERENGAN	L U A S	
		Ha	%
1.	0 - 2 %.	23.263	29,4
2.	2 - 15 %	36.690	46,3
3.	15 - 25 % dan 25 – 40 %	16.431	20,8
4.	> 40 %	2.742	3,5
JUMLAH		79.230	100.00

Sumber: http://pembangunanpamekasan.info/405_Kondisi_Geografis.gc

Ditinjau dari topografinya, wilayah Kabupaten Pamekasan terdiri atas tiga macam yaitu, wilayah datar/rata, berglombang/perbukitan, dan daerah pantai. Topografi, sangat berperan dalam menentukan potensi pengembangan lahan atau ruang pada suatu wilayah, dimana klasifikasi kelerengan di Kabupaten Pamekasan terbagi atas:

- a) Kelerengan 0 - 2% meliputi wilayah seluas 23.263 Ha atau 29,4% dari luas wilayah Kabupaten Pamekasan secara keseluruhan, kecuali daerah genangan air. Pada wilayah ini sangat berpotensi untuk pertanian tanaman semusim.
- b) Kelerengan 2 - 15% meliputi wilayah seluas 36.690 Ha atau 46,3% dari luas wilayah Kabupaten Pamekasan secara keseluruhan. Wilayah ini berpotensi sebagai lahan pertanian dengan tetap mempertahankan usaha pengawetan tanah dan air.
- c) Kelerengan 15 - 25% dan 25 - 40% meliputi wilayah seluas 16.431 Ha atau 20,8% dari luas wilayah Kabupaten Pamekasan secara keseluruhan.

Wilayah ini berpotensi sebagai kawasan budidaya tanaman keras/tanaman tahunan, karena wilayah tersebut mudah terkena erosi.

- d) Kelerengan > 40% meliputi wilayah seluas 2.742 Ha atau 3,5% dari luas wilayah Kabupaten Pamekasan secara keseluru. Wilayah ini berpotensi sebagai daerah hutan, yang dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup.

b. Geologis

Struktur Geologi yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Pamekasan terdiri atas Holosen Alluvium, Pliosen Limestone Facies, Miosen Sedimentary Facies, Cleiston Clay Sedimentary. Di bawah ini disajikan data klasifikasi luas wilayah Kabupaten Pamekasan, berdasarkan struktur batuan/geologinya.

Tabel 3 : Luas Wilayah Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Struktur Batuan

NO	KALA PEMBENTUKAN	BATUAN PEMBENTUK	LUAS	
			HA	%
1.	Holosen	Alluvium	17.689	22,33
2.	Pilosen	Limastone Facies	23.411	29,55
3.	Miosen	Sedimentary Facies	33.768	42,62
4.	Cleiston	Clay sedimentary	4.362	5,50
JUMLAH			79.230	100,00

Sumber: [http://pembangunanpamekasan.info/405_Kondisi Geografis.gc](http://pembangunanpamekasan.info/405_Kondisi_Geografis.gc)

Dari data di atas, terlihat bahwa lapisan batuan sedimen mendominasi hampir separuh luas wilayah Kabupaten Pamekasan, ini menandakan bahwa sebagian besar lapisan tanah di Pamekasan telah mengalami erosi dan sedimentasi, dimana pada peristiwa erosi dan sedimentasi, biasanya disertai pembalikan horizon tanah, sehingga dengan struktur yang demikian bisa

dikatakan tanahnya berumur muda dan kurang cocok untuk pertanian. Hal ini diperparah oleh kondisi struktur batuan induk Madura secara keseluruhan yang terbentuk oleh batuan gamping atau kapur yang bersifat basa dan kurang baik bagi pertumbuhan tanaman. Namun pada kenyataannya tanah di Pamekasan tergolong subur karena masih terdapat batuan pembentuk alluvium yang cukup banyak, dimana batuan tersebut kaya akan mineral dan unsur hara yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman.

c. Jenis Tanah

Jenis tanah berhubungan dengan kepekaan terhadap erosi, dimana tanah di Pamekasan dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan kepekaannya terhadap erosi. Klasifikasi jenis tanah tersebut adalah:

Tabel 4 : Klasifikasi Jenis Tanah Terhadap Erosi

Kelas	Jenis tanah	Tingkat kepekaan
I	Alluvial, tanah Glei, Planosal, hidromorf kelabu, laterik air tanah	Tidak peka
II	Latosol	Kurang peka
III	Brown forest soil, Noncolcic brown, mediteran	Agak peka
IV	Andosol, Loterik, Grumosol, Potsol, Podsolik	Peka

Sumber: [http://pembangunanpamekasan.info/405_Kondisi Geografis.gc](http://pembangunanpamekasan.info/405_Kondisi_Geografis.gc)

Sementara berdasarkan luasan wilayahnya, jenis tanah di Kabupaten Pamekasan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5 :Luas Daerah Berdasarkan Klasifikasi Tekstur Tanah

NO.	KLASIFIKASI TEKSTUR TANAH	LUAS	
		HA	%
1.	Alluvial Hidromor	4.538	5,73
2.	Alluvial Kelabu Kuningan	6.707	8,47
3.	Asosiasi Kelabu dan Planosol Coklat Kelabu	3.200	4,00
4.	Komplek Brown Forest Soil Litosol dan Mediteran	17.942	22,66
5.	Grumosol Kelabu	1.267	1,61
6.	Komplek Grumosol Kelabu dan Litosol	3.662	4,62
7.	Mediteran Merah dan Litosol	18.517	32,37
8.	Komplek Mediteran Grumosol	23.397	29,54
JUMLAH		79.230	100,00

Sumber: [http://pembangunanpamekasan.info/405_Kondisi Geografis.gc](http://pembangunanpamekasan.info/405_Kondisi_Geografis.gc)

Dari data pada tabel diatas terlihat bahwa jenis tanah di wilayah Kabupaten Pamekasan didominasi oleh grumosol, yang kepekaan terhadap erosinya tinggi. Selain grumosol, Kabupaten Pamekasan memiliki karakteristik dan kandungan tanah yang terdiri dari tanah aluvial. Tanah ini berkembang dari bahan induk yang berupa endapan liat (cetary) dan endapan liat yang bercampur pasir. Ciri yang paling menonjol adalah tanahnya berlapis-lapis dengan tingkat kesuburan yang relatif tinggi. Kandungan tanah lainnya adalah tanah litosol yang berbahan induk berupa batu kapur, batu pasir, campuran batu endapan tuf, batuan vulkan dan campuran batu kapur. Tanah ini belum mengalami perkembangan, sehingga dianggap sebagai tanah yang paling muda. Kandungan lainnya adalah tanah regosol dan tanah mediteran.

d. Iklim

Menurut kalsifikasi iklim oleh Koppen Kabupaten Pamekasan tergolong iklim Aw yaitu, iklim tropis, basah dan kering curah hujan yang jelas, sekurang-

kurangnya satu bulan < 60 mm (2,4 inch). Sedangkan menurut klasifikasi iklim menurut Oldeman, yang didasarkan atas bulan basah dan bulan kering untuk membantu usaha pertanian terutama padi, Kabupaten Pamekasan tergolong iklim D yang berarti, secara umum tergolong daerah kering. Berikut ini disajikan data curah hujan Kabupaten Pamekasan:

Tabel 6 : Jumlah Curah Hujan Maksimal dan Hari Hujan Serta Rata-rata Curah Hujan Per Bulan Tahun 2007

	Bulan	Curah Hujan Maksimal (mm)	Hari Hujan	Rata-rata Curah Hujan
1	Januari	398	65	210
2	Pebruari	793	185	300
3	Maret	668	192	271
4	April	583	154	198
5	Mei	286	57	151
6	Juni	442	69	182
7	Juli	273	32	132
8	Agustus	33	6	30
9	September	-	-	-
10	Oktober	424	21	241
11	Nopember	372	73	159
12	Desember	810	208	241
	Jumlah	5.082	1.062	2.115

Sumber : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan tahun 2007

Tabel 7 : Jenis Musim dan temperature rata-rata

<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Musim 	○ Penghujan	: Oktober - April
	○ Kemarau	: April - Oktober
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur Rata-Rata 	• Maximum	: 30°C
	• Minimum	: 28°C

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Kab.Pamekasan tahun 2007

Klim menyangkut curah hujan dalam kaitannya dengan erosi. Curah hujan di Kabupaten Pamekasan rata-rata termasuk dalam kelas I yaitu dibawah 13,6 mm/hari. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 8 : Intensitas Hujan

Kelas	Intensitas Hujan	Klasifikasi
I	< 13,6 mm/hari	Sangat rendah
II	13,6 - 20,7 mm/hari	Rendah
III	20,7 – 27,7 mm/hari	Sedang
IV	27,7 – 34,8 mm/hari	Tinggi
V	> 34,8 mm/hari	Sangat tinggi

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Kab.Pamekasan tahun 2007

e. Hidrologi

Melihat dari kondisi curah hujan rata-rata wilayah Kabupaten Pamekasan yang tergolong sangat rendah, maka dapat dipastikan sebagian besar wialayah Pamekasan mengalami defisit air. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah sungai dan mata air yang terdapat di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Tabel 9 :Jumlah Sungai Di Kabupaten Pamekasan

No.	Kecamatan	Jumlah Sungai
1	Tlanakan	6
2	Pademawu	13
3	Galis	4
4	Larangan	20
5	Pamekasan	2
6	Proppo	5
7	Palengaan	4
8	Pegantenan	2
9	Kadur	1
10	Pakong	1
11	Waru	2
12	Batumarmar	8
13	Pasean	1
Total		69

Sumber Data : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan, 2007

Tabel 10 :Jumlah Sumber / Mata Air Di Kabupaten Pamekasan

No.	Kecamatan	Sumber/Mata Air	
		Jumlah	Areal (Ha)
1	Tlanakan	1	2
2	Pademawu	1	6
3	Galis	-	-
4	Larangan	3	281
5	Pamekasan	1	5
6	Proppo	-	-
7	Palengaan	2	10
8	Pegantenan	6	260
9	Kadur	1	10
10	Pakong	18	1.257
11	Waru	2	105
12	Batumarmar	1	15
13	Pasean	4	138
Total		40	2.089

Sumber : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan tahun 2007

f. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah untuk sektor pertanian di Kabupaten Pamekasan meliputi sawah irigasi seluas 1.386 Ha, sawah semi irigasi seluas 5.213,03 Ha, sawah tadah hujan seluas 8.569 Ha, sedangkan penggunaan tanah tegalan seluas 32.966,34 Ha. (Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2013)

g. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam konteks RT RW Kabupaten Pamekasan terbagi atas tiga satuan wilayah pengembangan (SWP) yaitu:

- a) SSWP Selatan meliputi kecamatan Pamekasan, Pademawu, Larangan, Tlanakan, Galis dan Proppo dengan pusat pengembangan di Kecamatan Pamekasan. Arah pengembangan sektor perdagangan dan jalan skala regional industri kecil dan menengah, pariwisata, permukiman, perkantoran, perikanan budidaya tambak (bandeng dan udang), budidaya rumput laut, penangkapan dan pengolahan hasil perikanan, pelabuhan skala regional dan terminal tipe A, tambak garam dan kawasan konservasi hutan bakau.
- b) SSWP tengah meliputi Kecamatan Pegantenan, Pangelaan, Pakong, dan Kadur dengan pusat di Kecamatan Pakong. Arah pengembangan sektor pertambangan mineral nonlogam batuan dan minyak bumi, pertanian, peternakan, pariwisata, industri kecil dan menengah.

- c) SSWP Utara meliputi Kecamatan Waru, Pasean, dan Batumarmar dengan pusat pelayanan di kecamatan Waru. Arahan pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertambangan mineral non logam dan batuan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri kecil dan menengah.

2. Gambaran Umum Kelurahan Parteker



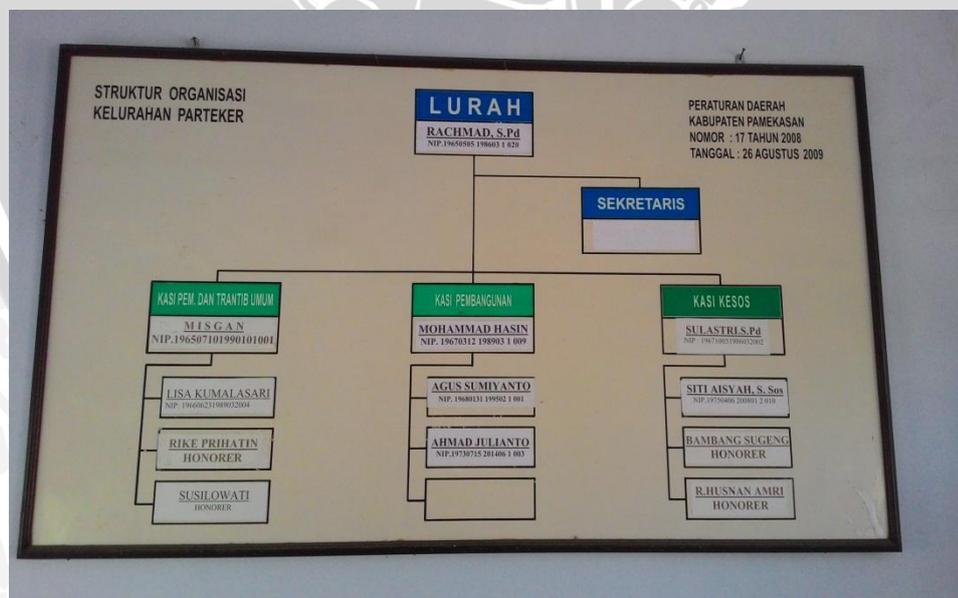
Gambar 3. Kelurahan Parteker

Kelurahan parteker adalah salah satu kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan jumlah penduduk Kelurahan Parteker 3.874 jiwa. Komposisi penduduk terdiri dari laki-laki 1.765 jiwa dan perempuan 2.109 jiwa dengan jumlah kepala keluarga mencapai 1.032

KK. Luas wilayah kelurahan parteker secara keseluruhan adalah 25.395 M². wilayah kelurahan parteker terbagi menjadi 4 RW dan 17 RT. Sedangkan jarak antara pemerintahan kelurahan parteker dengan pusat kota kecamatan pamekasan ± 0.75 km, dengan kota kabupaten pamekasan ± 1 km dan dengan pusat ibukota propinsi Jawa Timur ± 114 km. adapun batas-batas wilayah Kelurahan Parteker adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kelurahan Gladak Anyar
- b) Sebelah Timur : Kelurahan Barumbat Kota
- c) Sebelah Selatan : Kelurahan Patemon
- d) Sebelah Barat : Kelurahan Jungcangcang

Berikut di bawah ini adalah Gambar Struktur Organisasi Kelurahan Parteker



Gambar 4 : Struktur Organisasi Kelurahan Parteker

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2015

Sementara profesi penduduk kelurahan parteker ada pada tabel di bawah ini :

Tabel 11 : Profesi Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1	Pegawai Negeri	329	33.67
2	Guru/Dosen	225	23.03
3	Anggota Dewan	1	0.10
4	Pengusaha Menengah	57	5.83
5	Pengusaha Kecil	96	9.83
6	Pedagang Menengah	49	5.02
7	Pedagang Kecil	107	10.95
8	Pegarai Swasta	69	7.06
9	Buruh Bangunan	23	2.35
10	ABRI/Polisi	16	1.64
11	TKW/TKI	5	0.51
Total		977	100

Sumber : Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (2013-2015)

Fasilitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Parteker dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel12 : Fasilitas Sarana Prasarana Lingkungan

No.	Permasalahan Lingkungan Fisik	Jumlah	Kondisi
1	Bangunan TK	4	Baik
2	Bangunan SD/MI	6	Baik
3	Bangunan SPM/MTs	-	Baik
4	Masjid	6	Baik
5	Musholla	45	Baik
6	Langgar	32	Cukup

Sumber : Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (2013-2015)

B. Penyajian Data Dan Fokus Penelitian

1) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan

a. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan

PNPM memfasilitasi masyarakat serta pemerintah daerah untuk mampu menangani akar penyebab kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam hal ini PNPM meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya.

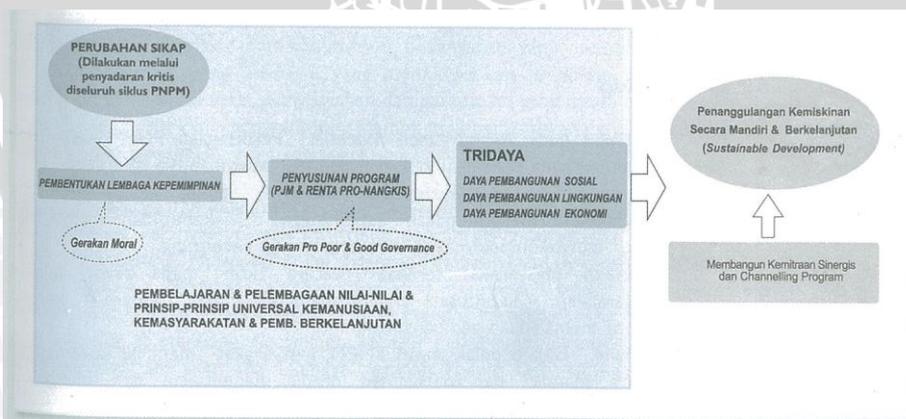


Diagram 2.2. Penanganan Akar Kemiskinan oleh Masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan

Gambar 5 : Alur Penanganan Kemiskinan Oleh Masyarakat melalui PNPM-MP

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2009

Alur tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Subhan Taufik selaku koordinator BKM Adil Makmur kelurahan Parteker Pamekasan sebagai berikut:

“Jadi begini mas, perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat yang ada di gambar itu merupakan pondasi yang kokoh untuk terbangunnya lembaga kepemimpinan masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sehingga pada giliran dapat dibangun kepemimpinan moral yang mandiri.” (*Sumber : Wawancara pada tanggal 09 September 2015, pukul 10.00, Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur kelurahan parteker pamekasan*)

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan, dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Proses pembelajaran di tingkat masyarakat ini berlangsung selama masa program maupun pasca program oleh masyarakat sendiri dengan membangun dan melembagakan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK).

Penguatan lembaga masyarakat yang dimaksud PNPM terutama dititikberatkan pada upaya penguatan pelakunya untuk mampu menjadi pelaku nilai dan pada gilirannya mampu menjadi motor penggerak dalam “melembagakan” dan “membudayakan” kembali nilai-nilai luhur universal kemanusiaan (gerakan moral), prinsip-prinsip kemasyarakatan (gerakan tatakeperintahan yang baik) serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (gerakan Tridaya) sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Hal ini diperjelas oleh

Bapak Subhan Taufik selaku koordinator BKM Adil Makmur kelurahan Parteker

Pamekasan:

“Melalui lembaga kepemimpinan masyarakat tersebut nantinya diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam kemiskinan. Tentunya tidak mudah, namun dengan adanya lembaga tersebut diharapkan dapat tercipta lingkungan perkotaan dan perumahan yang lebih layak huni didalam pemukiman yang lebih responsif dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri dalam melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.” (Sumber : Wawancara pada tanggal 09 September 2015, pukul 10.00, Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur kelurahan parteker pamekasan)

Proses awal dalam pelaksanaan PNPM mandiri perkotaan adalah pemilihan lokasi sasaran. Langkah-langkah seleksi pemilihan lokasi sasaran menurut panduan PNPM mandiri perkotaan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

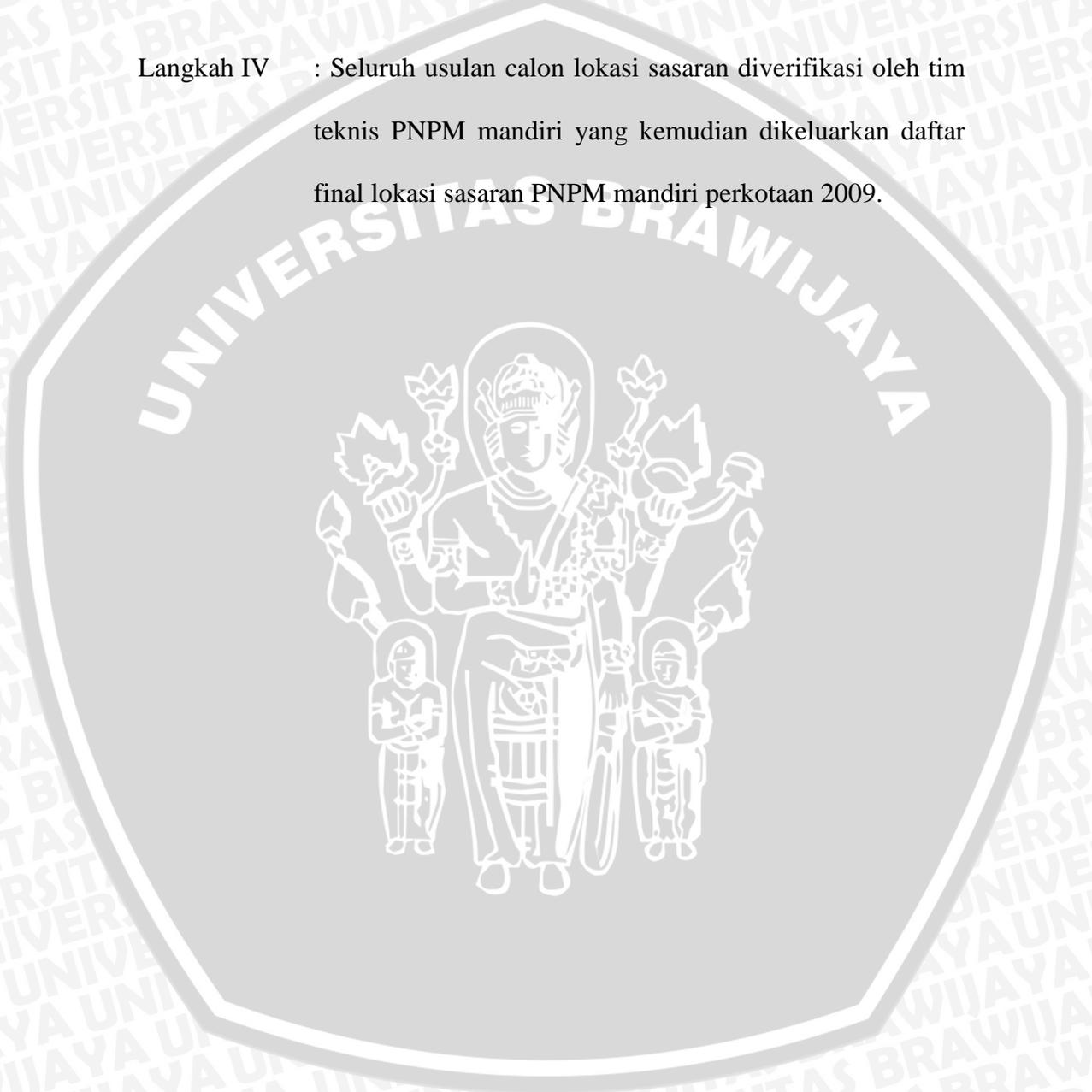
Langkah I : Berdasarkan data potensi desa tahun 2006 dan Data Permendagri No.6 Tahun 2008 dipilih kecamatan perkotaan, yaitu kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan lebih banyak daripada jumlah desa dan kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten.

Langkah II : Dari kecamatan perkotaan tersebut dipilih seluruh kelurahan atau desa, yang ada dalam daftar pemekaran (SK pemekaran sebelum bulan april 2008).

Langkah III : Dari seluruh daftar kelurahan/desa diambil daftar lokasi PNPM perkotaan atau PNPM 2008 yang masuk kecamatan perkotaan atau daftar lokasi baru PNPM 2009 yang ada di

kecamatan perkotaan, sedangkan daftar lokasi PNPM 2008 yang masuk kedalam wilayah pemekaran kecamatan pedesaan akan difasilitasi oleh PNPM pedesaan

Langkah IV : Seluruh usulan calon lokasi sasaran diverifikasi oleh tim teknis PNPM mandiri yang kemudian dikeluarkan daftar final lokasi sasaran PNPM mandiri perkotaan 2009.



a.1. Kelompok Sasaran dan Penerima Manfaat

Tabel 13 : Kelompok Sasaran dan Penerima Manfaat

Uraian Kelompok Sasaran	Bantuan Teknik/Pendampingan	Bantuan Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat warga kelurahan peserta PMPM-MP • LKM/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat • KSM/Kelompok swadaya Masyarakat 	Warga kelurahan yang miskin menurut kriteria kemiskinan setempat yang telah disepakati warga termasuk yang telah lama miskin, yang penghasilannya menjadi tidak berarti karena inflasi, yang kehilangan sumber penghasilannya.
Pemerintah kota/kabupaten, TKPP dan TKPK daerah	Perangkat pemerintahan kota/kabupaten s/d kelurahan/desa yang terkait dengan pelaksanaan PNPM-MP, anggota TKPP dan TKPK daerah	
Para pemangku kepentingan terkait	Perorangan atau asosiasi profesi, asosiasi usaha sejenis, perguruan tinggi, LSM, Bank, notaris, auditor publik, media masa yang peduli dengan kemiskinan.	

Sumber : Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2009

a.2. Penerima Manfaat Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan

Penerima manfaat langsung dari dana BLM yang disediakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan adalah keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat

sendiri dan disepakati serta diterapkan bersama oleh masyarakat kelurahan, melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya berorientasi IPM-MDGs.

Dalam proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM-MP), baik itu perencanaan, pemasaran, serta pelaksanaan pembangunan membutuhkan adanya bantuan pendampingan, dimana bantuan tersebut diberikan melalui penugasan tim fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Subhan Taufik selaku koordinator BKM Adil Makmur kelurahan Parteker Pamekasan mengenai tahapan pendampingan.

“Untuk proses pendampingan mulai dari kelembagaan BKM desa terkait kesiapan mereka untuk mendapatkan dana serta pengelolaannya. Kemudian pendampingan pengelolaan di tingkat perencanaan pembangunan, dimana adanya tim ahli yang dibayar oleh desa untuk membantu masyarakat dalam proses perencanaan. Selain itu, kami memfasilitasi tim pemasaran desa untuk memberikan cara kepada masyarakat agar bisa mendapatkan *channeling* dari pihak lain untuk mendapatkan dana dan untuk pelaksanaan kegiatan tugas kami mengawal dalam pelaksanaan pembangunan selesai.” (Sumber : Wawancara pada tanggal 09 September 2015, pukul 10.00, Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur kelurahan parteker pamekasan)

a) Bantuan pendampingan

Bantuan pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan

melaksanakan program masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di kelurahan masing-masing.

Proses pendampingan ini sekurang-kurangnya harus menghasilkan:

- a. Masyarakat yang peduli dengan kemiskinan dan kelestarian lingkungan serta mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.
- b. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dipercaya, aspiratif, representatif, dan akuntabel
- c. PJM Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat
- d. Relawan dan Relawan Khusus (spesialisasi berdasarkan minat) sebagai penggerak proses pembangunan partisipatif di wilayahnya.
- e. Kegiatan dan forum pemantauan partisipatif dengan memastikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan PJM Pronangkis dan nilai luhur
- f. Masyarakat yang memahami dan mampu melaksanakan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan sesuai substansi pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
- g. Forum LKM di tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mendukung harmonisasi berbagai program

Lebih lanjut dijelaskan lagi oleh Bapak Subhan Taufiq mengenai kegiatan pendampingan masyarakat,

“Di dalam kegiatan pendampingan masyarakat ini terdiri dari serangkaian kegiatan antara lain edukasi / orientasi dan pelatihan, membangun komitmen bersama, melakukan survei swadaya, merumuskan kebutuhan nyata dari hasil pendataan yang dilakukan secara swadaya, menyusun rencana tindak penataan kembali lingkungan permukiman di wilayahnya sampai dengan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi mas.”(Sumber : Wawancara pada tanggal 09 September 2015, pukul 10.00, Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur kelurahan parteker pamekasan)

Secara rinci jenis kegiatan pendampingan mencakup :

- a. Pertemuan-pertemuan/musyawah/diskusi, dan sebagainya ditingkat komunitas kelurahan/desa dan kecamatan baik yang bersifat pengambilan keputusan maupun untuk penyebarkan informasi (sosialisasi).
 - b. Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar.
 - c. Survei swadaya, termasuk identifikasi calon penerima bantuan, analisis, pembuatan peta tapak dan penulisan laporan.
 - d. Kerja kelompok penyusunan program pembangunan untuk kurun waktu 3 tahun dan rencana tahunan dengan rencana investasi tahun pertama penanggulangan kemiskinan.
 - e. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana investasi tahunan untuk penanggulangan kemiskinan.
- b) Bantuan dana

Pada dasarnya kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) ini lebih banyak menitikberatkan keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan, meskipun secara strategi menggunakan pembangunan lingkungan untuk membangun sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, secara khusus penyediaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah sebagai stimulan bagi masyarakat untuk praktek menerapkan apa yang sudah mereka rencanakan dan sepakati dalam pembangunan/penataan kembali permukiman, sehingga belajar melalui praktek membangun terjadi dan etika pembangunan ditegakkan bukan sekedar wacana. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Subhan Taufik selaku koordinator BKM Adil Makmur kelurahan Parteker Pamekasan.

“Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) merupakan dana yang diberikan kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan PNPM-MP yang terdiri atas tiga tahapan, yakni tahap pertama sebesar 30%, tahap kedua sebesar 50%, dan tahap ketiga sebesar 20%.” (Sumber : Wawancara pada tanggal 09 September 2015, pukul 10.00, Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur kelurahan parteker pamekasan)

Bantuan dana diberikan dalam bentuk Dana BLM. BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah diterapkan pada PJM dan Renta Pronangkis.

Besarnya dana BLM tiap kelurahan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan, seperti pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 14 : Kategori Alokasi Dana

Kategori Lokasi	Kategori Jumlah Penduduk Kelurahan (Jiwa)		
	<3000	3000-10000	>10000
%-tase KK miskin > 10% (0-1 x BLM)	150 jt	200 jt	350 jt
%-tase KK miskin > 10% (2 x BLM)	100 jt	150 jt	200 jt
%-tase KK miskin <10%	Jumlah kk miskin <50 kk, BLM = 50 jt Jumlah kk miskin > 50 kk, BLM = 100jt		
Mekanisme Pencairan Dana BLM	Dilakukan 3 tahap, yakni : Tahap 1 = 30%, Tahap 2 = 50%, Tahap 3 = 20%		

Sumber : Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2009

Pada dasarnya dana BLM dapat digunakan secara luwes dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis, pembelajaran aspek Tridaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan/desa yang bersangkutan.

PNPM Mandiri Perkotaan melarang dana BLM dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan

norma-orma, hukum serta peraturan yang berlaku. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Subhan Taufik selaku koordinator BKM Adil Makmur kelurahan Parteker Pamekasan.

“Dana dari BLM tidak bisa digunakan sembarangan, ada aturan-aturan dalam menggunakan dana tersebut, ada banyak jenis kegiatan dimana PNPM akan menindaktegas jika kegiatan tersebut menggunakan dana dari BLM.” (*Sumber : Wawancara pada tanggal 09 September 2015, pukul 10.00, Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur kelurahan parteker pamekasan*)

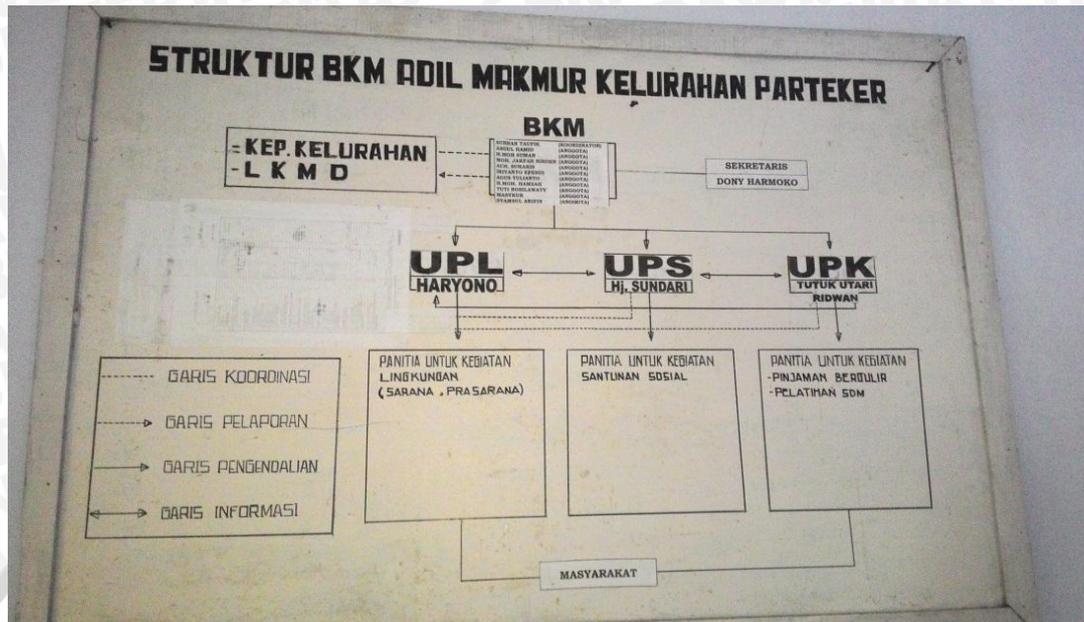
Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BLM adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll);
2. Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya);
3. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank;
4. Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya;
5. Pembebasan lahan;
6. Pembangunan rumah ibadah;
7. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor LKM;
8. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam safeguard;

9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tatasusila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai universal.

Lembaga kepemimpinan dalam PNPM Mandiri perkotaan disebut dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM adalah istilah untuk suatu lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu *himpunan masyarakat warga* ditingkat Kelurahan/ Desa. Dengan kalimat lain dapat dikatakan BKM adalah lembaga pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan yang dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. BKM terbentuk dengan adanya rembug atau diskusi yang dilakukan oleh masyarakat dimana diskusi ini menghasilkan keputusan bahwa masyarakat sepakat untuk menanggulangi kemiskinan secara bersama dan terorganisir. Rembug atau diskusi ini dilakukan dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai ke tingkat kelurahan.

Di kelurahan Parteker ini BKM yang terbentuk bernama BKM “Adil Makmur”, berikut adalah gambar struktur BKM Adil Makmur Kelurahan Parteker:



Gambar 6 :Struktur Organisasi BKM Adil Makmur

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Disebutkan dalam Anggaran Dasar Badan Keswadayaan Masyarakat “Adil Makmur” 2013-2015, Adapun peran, fungsi dan tanggung jawab BKM di bawah ini :

Peran Utama BKM :

1. Mengorganisasikan warga secara parsitipatif untuk meurumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskini (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PjOK ntuk mencairkan dana BLM
2. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya di tingkat komunitas



3. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan;
 4. Menunmbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka
 5. Mengembangkan jaringan BKM di tingkat kecamatan, kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya
 6. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang sehari-hari dikelola oleh UP-UP BKM
- (Sumber : Anggaran Dasar BKM “Adil Makmur” Bab IV Pasal 9)

Fungsi:

1. Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat;
2. Pusat pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dsb)
3. Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan;
4. Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan, utamanya penanggulangan kemiskinan;
5. Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat;

6. Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat Desa/Kelurahan;serta
7. Pusat advokasi dan integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah.

(Sumber : Anggaran Dasar BKM “Adil Makmur” Bab IV Pasal 10)

Tanggung Jawab:

Menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan.

(Sumber : Anggaran Dasar BKM “Adil Makmur” Bab IV Pasal 10)

a.3. Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis)

PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan) adalah suatu hasil dari proses perencanaan partisipatif dengan perspektif waktu 3 tahun dari suatu program penanggulangan kemiskinan di suatu kelurahan. PJM Pronangkis ini kemudian dijabarkan menjadi Ren-Ta (Rencana Tahunan) yang merupakan rencana investasi tahunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan suatu kelurahan. Ren-Ta ini juga harus dilakukan secara partisipatif dan dievaluasi setiap tahun, sedangkan PJM Pronangkis dievaluasi setiap 3 tahun sekali. PJM dan Ren-Ta Pronangkis bersifat *open menu*, sehingga sesuai kebutuhan masyarakat (hasil pemetaan swadaya),

dengan sumber dana bersalah dari swadaya masyarakat, dukungan Pemda, bantuan pemerintah pusat, akses *chanelling program*, serta donatur lainnya.

Penjelasan mengenai PJM Pronangkis dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Subhan Taufik selaku koordinator BKM Adil Makmur kelurahan Parteker Pamekasan,

“PJM Pronangkis harus disusun secara partisipatif oleh TIP (Tim Inti Perencana) yang dibentuk oleh kami selaku BKM, yang di dalamnya terdiri dari unsur BKM, relawan, warga peduli dan secara interaktif dilakukan konsultasi kepada pemeritah setempat dan masyarakat luas melalui berbagai media. PJM dapat terdiri dari investasi pembangunan prasarana yang telah diidentifikasi dari awal survei yang pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh BKM dengan membentuk panitia pembangunan; atau kegiatan pembangunan prasarana skala kecil yang dapat diusulkan oleh kelompok masyarakat dan termasuk dalam sektor prasarana yang memang diprioritaskan; kegiatan pinjaman bergulir yang nantinya menjadi landasan untuk dikembangkan menjadi kredit mikro; atau kegiatan sosial untuk membantu warga yang benar-benar tidak mampu, meskipun demikian kegiatan sosial ini harus sudah direncanakan keberlanjutannya”.(Sumber : Wawancara pada tanggal 09 September 2015, pukul 10.00, Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur kelurahan parteker pamekasan)

PJM Pronangkis yang dijalankan oleh BKM tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan gerakan Tridaya.Gerakan tersebut mengacu pada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tridaya ini dapat dipahami sebagai proses pemberdayaan masyarakat agar terbangun : daya sosial sehingga tercipta masyarakat efektif, daya ekonomi sehingga tercipta masyarakat produktif dan daya pembangunan sehingga tercipta masyarakat pembangunan yang peduli lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam konteks P2KP diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya.

1. **Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection*)**; dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.
2. **Pengembangan Masyarakat (*Social Development*)**; tiap langkah kegiatan P2KP harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable groups*) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat;

3. **Pengembangan Ekonomi (*Economic Development*)**; dalam upaya menyasikan kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan atau penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial.

Penjelasan di atas senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Subhan Taufik selaku koordinator BKM Adil Makmur kelurahan Parteker Pamekasan

“Sebenarnya prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan tersebut pada hakekatnya merupakan pemberdayaan yang terintegrasi mas, maksudnya pemberdayaan manusia yang sebenarnya, supaya nantinya mampu membangkitkan tiga daya yang dimiliki oleh manusia secara integratif, yaitu daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli akan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan, sosial, dan ekonomi.” (*Sumber : Wawancara pada tanggal 09 September 2015, pukul 10.00, Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur kelurahan parteker pamekasan*)

b. Peran Multiaktor dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan

Sesuai dengan undang-undang No.32 Tahun 2004, Pemerintah Pusat memberi ruang bagi terselenggaranya Pemerintahan di Daerah secara lebih demokratis dengan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.

Secara umum peran Pemerintah Daerah adalah sebagai fasilitator, regulator, dinamisator, dan koordinator dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Peran Pemda sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).
2. Peran Pemda sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan).
3. Peran Pemda sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah) dan
4. Peran Pemda sebagai Koordinator adalah mengintegrasikan program-program berbasis penanggulangan kemiskinan (melalui mekanisme perencanaan partisipatif, seperti musrenbang kel/desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten/kota)

Untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), khususnya di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan, maka tidak lazim apabila kegiatan program tersebut dibebankan kepada pihak pemerintah saja. Dibutuhkan adanya suatu kerja sama antar aktor/*stakeholders* untuk mensukseskan kegiatan yang bertumpu pada perencanaan partisipatif pembangunan dari masyarakat melalui kegiatan pembangunan fisik. Hal ini

dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dari pemerintah untuk mencakup seluruh kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) sehingga dibutuhkan adanya suatu kolaborasi antara pemerintah, swasta, sampai dengan keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Hal ini disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuna selaku Sekretaris BKM “Adil Makmur” Kelurahan Parteker.

“Mengenai peran multi aktor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan yang dimana pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan secara tidak langsung, seperti adanya program dari dinas – dinas tertentu yang harus dilakukan *channeling* kepada Pemda dan memberikan fasilitas seperti itu. Untuk swasta melakukan *channeling* dengan mengucurkan dana untuk membantu masyarakat yang melaksanakan program PNPM-MP. Dan pada sisi masyarakat sebagai pihak yang merencanakan kegiatan pembangunan serta mengembangkan potensi – potensi yang ada di desa, baik itu Sumber daya Alam (SDA) maupun Sumber daya Manusia (SDM).” (Sumber : Wawancara pada tanggal 09 September 2015, pukul 10.00, Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur kelurahan parteker pamekasan))

Pentingnya kerjasama antar *stakeholders* dalam pelaksanaan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) telah dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP dimana sasaran kelompok dari program PNPM-MP adalah :

1. Masyarakat / BKM / LKM

Masyarakat desa / kelurahan utamanya kelompok miskin dengan BKM/LKM yang memenuhi kriteria berdaya menuju mandiri atau mandiri.

2. Pemerintah daerah

Perangkat pemerintahan dari tingkat kota / kabupaten, kecamatan hingga kelurahan, khususnya yang terkait dengan penataan ruang, pembangunan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pertanahan serta mitigasi bencana bersama masyarakat.

3. Para Pihak terkait lainnya

Pihak terkait (pemangku kepentingan) di luar kelompok masyarakat kelurahan sasaran dan perangkat pemerintahan seperti: sektor swasta, perbankan, LSM, perguruan tinggi, asosiasi profesi dan usaha sejenis, dll.

Selain dari itu, keberhasilan dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ini akan sangat tergantung dari dukungan seluruh masyarakat dan perangkat pemerintah kota / kabupaten dalam membangun kolaborasi kerja antara pemerintah, masyarakat dan para pihak peduli termasuk kalangan dunia usaha. Salah satu bentuk dukungan yang penting dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ini adalah komitmen dari seluruh pelaku untuk melaksanakan tugas dan fungsi

masing-masing), menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan prinsip – prinsip *good governance*.

Seluruh pelaku harus secara terbuka saling bersinergi dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan ini terutama mengawasi dana BLM sebagai stimulan yang pemanfaatannya haruslah tepat sasaran sesuai program yang disiapkan oleh masyarakat bersama pemerintahnya, dan memberikan prioritas bagi masyarakat miskin sebagai kelompok penerima manfaat dalam rangka upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran *Millenium Development Goals*(MDG's) serta peran pelayanan publik yang harusnya dilakukan oleh tiap agen pemerintah, baik dinas maupun badan yang terkait, termasuk pula dalam komitmen untuk taat dalam penerapan sanksi. Transparansi dalam setiap pelaksanaan kegiatan pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai pelaksanaan, mulai dari kebijakan, proses pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan, serta informasi – informasi lainnya dari para pelaku PNPM-MP. (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2009)

Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah (1) Lurah/Kades dan perangkatnya, (2) Relawan masyarakat, (3) LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), (4) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sbb:

1. Lurah atau Kepala Desa

Secara umum peran utama Kepala Kelurahan/Lurah dan Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dapat tercapai dengan baik. Untuk Itu Lurah/ Kepala Desa dapat mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing.

Secara rinci tugas dan tanggung jawab Lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu sosialisasi tingkat kelurahan/desa dan Rembug Kesiapan Masyarakat yang menyatakan kesiapan seluruh masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan;
- b. Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan KMW/Tim Fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya (Community Self Survey) dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat;
- d. Memfasilitasi proses pembentukan LKM. (Bentuk-bentuk dukungan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan);

- e. Memfasilitasi dan mendukung penyusunan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan dan rencana tahunannya oleh masyarakat yang diorganisasikan oleh lembaga kepemimpinan masyarakat setempat (LKM);
- f. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan termasuk peninjauan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan;
- g. Memfasilitasi PJM Pronangkis sebagai program kelurahan/desa untuk dibahas didalam Musrenbang kelurahan/desa;
- h. Memberi laporan bulanan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan diwilayahnya kepada Camat; dan
- i. Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan LKM, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya

2. **Relawan Masyarakat**

Paling tidak ada 2 perkara terkait dengan relawan masyarakat (i) mengapa perlu relawan, dan (ii) siapakah relawan. Kehadiran relawan masyarakat ini sangat dibutuhkan sebagai konsekuensi logis dari penerapan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dan menerapkan konsep ‘membangun dari dalam’ (*development from within*) yang membutuhkan pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat sendiri yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli, dan memiliki komitmen kuat

pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. Hal ini dipertegas oleh penjelasan bapak Subhan Taufiq Selaku Koordinator BKM “Adil Makmur”:

“Dalam Pelaksanaan PNPM-MP ini tentu tidak bisa seluruhnya dari pihak kami selaku perangkat daerah, tentunya butuh bantuan dari masyarakat sebagai sasaran dari program PNPM ini, bantuan dan *feedback* dari mereka merupakan salah satu indikator keberhasilan program ini, pembentukan renta dan sebagainya membutuhkan keikutsertaan masyarakat” (*Sumber : Wawancara pada tanggal 09 September 2015, pukul 10.00, Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur kelurahan parteker pamekasan*)

Di sisi yang lain proses membangun dari dalam tidak akan terlaksana apabila pelopor-pelopor yang menggerakkan masyarakat tersebut merupakan individu atau sekumpulan individu yang hanya memiliki pamrih pribadi dan hanya mementingkan urusan ataupun kepentingan pribadi serta golongan atau kelompoknya. Dengan kata lain, perubahan perilaku masyarakat akan sangat ditentukan oleh relawan-relawan yang memiliki moral yang baik dan mampu menjadi contoh perubahan itu sendiri sehingga pemilihan relawan tidak boleh semata-mata didasarkan pada pengalaman, pendidikan, status sosial, dll tetapi lebih pada kandungan moral yang dimiliki.

Didasarkan pada keyakinan inilah, PNPM Mandiri Perkotaan mendorong masyarakat di lokasi sasaran agar membuka kesempatan seluas mungkin bagi warga yang ikhlas, jujur, adil, peduli dan memiliki komitmen untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan program agar bermanfaat bagi masyarakat miskin serta seluruh masyarakat di wilayahnya.

Dengan demikian peran utama para relawan adalah :

- a. Pelopor perubahan.
- b. Pengerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses PNPM Mandiri Perkotaan yang memang direncanakan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat atau meningkatkan kapasitas, sehingga secara rinci relawan diharapkan menjadi pelopor dalam siklus program; refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembentukan BKM, pengorganisasian KSM, perencanaan partisipatif, dsb.
- c. Pengawasan nilai-nilai luhur, seperti transparansi, demokrasi, kejujuran, dsb oleh sebab itu setelah LKM terbentuk tim relawan ini harus berfungsi sebagai pengawas partisipatif terhadap keseluruhan proses sehingga terbangun control social yg mantap. Tata cara untuk ini akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik.
- d. Mitra Kerja LKM, oleh sebab itu para Relawan akan membentuk Forum Relawan dan berhak mendapat informasi perkembangan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh LKM. Untuk itu secara rutin (tiap bulan) harus ada pertemuan antara Forum Relawan dan LKM.

3. **LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat)**

Dilokasi-lokasi dimana P2KP dan PNPM P2KP telah mulai bekerja, maka di lokasi tersebut sdh terbentuk LKM sebagai “dewan amanah” atau “pimpinan kolektif” organisasi masyarakat warga setempat (kelurahan/desa) LKM ini bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangankeswadayaan

masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Subhan Taufik Selaku Koordinator BKM “Adil Makmur”:

“Jika Ditanya beda BKM dan LKM, sebenarnya itu sama saja, hanya waktu pembentukannya saja yang berbeda dimana BKM dibentuk saat Program ini masih bernama P2KP dan diubah menjadi LKM saat program mengalami perubahan nama menjadi PNPM, intinya sama saja bersifat generik, LKM merupakan satuan kerja yang menangani kerja tim fasilitator mengenai segala bentuk penyelenggaraan operasional kegiatan pelaksanaan PNPM-MP atas perencanaan pembangunan ke depan yang dilegalisasi oleh tim PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) desa, yang nantinya perencanaan yang telah dilegalisir dapat digunakan sebagai syarat untuk pencairan dana BLM.” (Sumber : Wawancara pada tanggal 09 September 2015, pukul 10.00, Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur kelurahan parteker pamekasan)

Oleh sebab itu peran utama LKM adalah :

- a. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana BLM.
- b. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya.
- c. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yg dilaksanakan.
- d. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

- e. Mengembangkan jaringan LKM di tingkat kecamatan, kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya.
- f. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat (BLM), yang sehari-hari dikelola oleh UPK.

4. **KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)**

Disamping LKM di lokasi yang telah menjalani P2KP/PNPM juga sudah terbentuk KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat adalah nama jenerik untuk kelompok warga masyarakat pemanfaat dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan yang memiliki ikatan kebersamaan (*common bond*) dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini senada dengan penjelasan ibu Jakfar selaku relawan koordinator KSM :

“Saya mengajukan diri secara sukarela mas untuk menjadi koordinator kelompok, karena banyak dari ibu-ibu bapak-bapak yang mendukung saya menjadi koordinator masyarakat dengan alasan sudah kenal dan tahu kinerja saya selama mejadi kordi, jadi saya oke-oke saja dengan usulan mereka untuk menjadi koordinator masyarakat sini” (Sumber : Wawancara pada tanggal 09 September 2015, pukul 12.00, Bertempat di Rumah Ibu Jakfar)

KSM ini bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan terkait dgn penanggulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh LKM melalui berbagai dana yg mampu digalang.

Oleh sebab itu tugas pokok KSM adalah:

- a. Menyusun usulan kegiatan pembangunan terkait dgn penanggulangan kemiskinan.
- b. Mengelola dana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatan pembangunan yg diusulkan.
- c. Mencatat dan membuat laporan kegiatan dan keuangan kegiatan pembangunan yg diusulkan.
- d. Menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan pembangunan yang ditekuninya (transparansi, demokrasi, membangun dgn mutu, dsb).
- e. Secara aktif menjadi bagian dari kendali social (control social) pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Masyarakat merupakan komponen inti dari pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan, dimana masyarakat adalah penentu utama sukses tidaknya pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan. Keikutsertaan masyarakat desa dalam program ini diharapkan dapat menentukan keadaan desa di masa mendatang yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui pembangunan fisik. Pada program PNPM Mandiri Perkotaan, masyarakat dituntut untuk bisa merencanakan tujuan desa ke depan, pemasaran potensi wilayah desa, sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan melalui musyawarah oleh 3-5 orang utusan dari setiap RW di wilayah Kelurahan Parteker.

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program pembangunan yang mengacu kepada 3 aspek yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menjadi sasaran program agar menjadi lebih berdaya dan mandiri. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan sampai dengan pelaksanaan pembangunan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang nantinya akan menentukan pembangunan seperti apa yang dapat menunjang kehidupan masyarakat untuk jangka waktu panjang. Seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan atas keputusan bersama, dimana nantinya usulan-usulan mengenai perencanaan pembangunan di wilayah Kelurahan Parteker akan disaring berdasarkan besarnya kebutuhan masyarakat.

Sebelum dilaksanakannya kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, maka proses pengenalan atas program tersebut mutlak dilakukan untuk memberikan gambaran umum sampai dengan khusus atas program tersebut kepada Masyarakat Kelurahan Parteker. Besarnya pengetahuan masyarakat akan kegiatan PNPM-MP diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi besar pada pelaksanaan program PNPM-MP, baik dalam hal perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Seperti yang diungkapkan diatas, Bapak Achmad Julianto selaku salah satu masyarakat Kelurahan Parteker sekaligus Kasi Pembangunan BKM mengatakan akan besaran pengetahuan masyarakat atas program tersebut.

“Masyarakat yang mengerti secara detail mengenai program PNPM-MP ini sebenarnya hanya beberapa orang saja yang tergabung ke dalam panitia program atau di BKM seperti saya ini mas, jadi nantinya saya akan menjelaskan lagi kepada masyarakat apa-apa saja yang harus dilakukan. Maklum saja mas mayoritas masih banyak yang bekerja sebagai buruh

tani, jadi pengetahuan mengenai perencanaan program ini rendah. Jadinya nanti pada saat kegiatan informal saya dan ketua RT melakukan sosialisasi program secara menyeluruh seperti setelah sholat jumat ataupun kegiatan lain sehingga setiap berita mengenai kemajuan program PNPM-MP dapat disampaikan secara menyeluruh.”

(Sumber : Wawancara pada tanggal 9 September 2015, pukul 13.00, Bertempat di Rumah Bapak Achmad Julianto)

Dalam proses perencanaan pembangunan, Masyarakat Kelurahan Parteker sebagai subjek serta objek dari sasaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM-MP) turut ambil bagian dalam proses penentuan rencana pembangunan di Kelurahan Parteker. Dimana proses perencanaan ini berfungsi untuk membentuk visi dan misi pembangunan yang nantinya akan dijalankan, baik itu pembangunan jangka pendek, menengah, sampai dengan jangka panjang. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Subhan Taufiq selaku koordinator BKM Adil Makmur.

“Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM-MP), masyarakat sebagai informan dan juga sebagai pelaku pelaksana program, dimana masyarakat memberitahukan potensi potensi yang tersedia dalam wilayah kelurahan, baik itu Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM), dan juga masyarakat sendiri yang menentukan perencanaan detail di wilayah kelurahan yang akan dijadikan sasaran program PNPM ini.” *(Sumber : Wawancara pada tanggal 9 September 2015, pukul 11.00 Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur Kelurahan Parteker)*

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Ahmad Julianto selaku masyarakat kelurahan parteker sekaligus Kasi Pembangunan BKM Adil Makmur mengenai peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui program PNPM-MP.

“Peranan masyarakat melalui musyawarah dalam perencanaan pembangunan, kami mengajukan kebutuhan atas pembangunan fisik yang dirasa kurang, seperti aspal yang rusak, gorong gorong yang hancur yang menyebabkan *drainase* mampet, sampai dengan sanitasi yang nantinya akan dipilih berdasarkan kebutuhan yang paling kami butuhkan saat musyawarah nanti.” (Sumber : Wawancara pada tanggal 9 September 2015, pukul 13.00, Bertempat di Rumah Bapak Achmad Julianto)

Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM-MP), peranan masyarakat dalam pelaksanaan program tidak hanya pada perencanaan pembangunan, namun juga masyarakat ikut serta dalam proses pengerjaan pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan merupakan wujud masyarakat kelurahan Parteker dalam mensukseskan kegiatan PNPM-MP dan peduli atas pembangunan di wilayahnya. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Ahmad Julianto selaku masyarakat kelurahan Parteker sekaligus kasi Pembangunan BKM Adil Makmur.

“Peranan masyarakat setempat, saya salah satunya, tidak hanya dalam perencanaan pembangunan wilayah kelurahan, namun juga dalam pelaksanaan pembangunannya, kita disini dibantu dengan masyarakat lainnya antusias dalam proses pembangunan wilayah sini, masyarakat ikut membantu dengan mencurahkan tnganya dalam proses pembangunan fisik seperti pembangunan gorong – gorong / *Drainase*, pengaspalan jalan, pemasangan *paving block*, dan lain lain sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui secara musyawarah. Dan juga bantuan masyarakat khususnya ibu-ibu sekitar wilayah pembangunan atas pembeian konsumsi kepada para sukarelawan yang ikut membantu proses pembangunan.” (Sumber : Wawancara pada tanggal 9 September 2015, pukul 13.00, Bertempat di Rumah Bapak Achmad Julianto)

Berikut adalah gambar proses pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat melalui program PNPM-MP :



Gambar 7 : Pembangunan Gorong – Gorong / Drainase oleh warga kelurahan Parteker

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Lingkungan BKM Adil Makmur



Gambar 8 : Hasil Pembangunan Gorong – Gorong / Drainase oleh warga kelurahan Parteker

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Lingkungan BKM Adil Makmur



Gambar 9 : Pemasangan *paving block* oleh warga kelurahan Parteker

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Lingkungan BKM Adil Makmur



Gambar 10 : Hasil Pemasangan *paving block* oleh warga kelurahan Parteker

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Lingkungan BKM Adil Makmur

Masyarakat selaku objek dari sasaran program pemerintah melakukan kegiatan pengawalan atas jalannya keseluruhan pelaksanaan program untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses pembangunan. Masyarakat Kelurahan Parteker sebagai pelaku perencana sekaligus eksekutor pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan melakukan kegiatan pengawasan atas pembangunan yang telah terselenggara dengan menggunakan dana hibah program PNPM-MP. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Subhan Taufiq selaku Koordinator BKM Adil Makmur Kelurahan Parteker.

“Tindakan pengawasan atas pelaksanaan program PNPM-MP dari masyarakat terbukti dari swadaya masyarakat yang ikut mencurahkan tenaga dan juga persediaan konsumsi untuk relawan. Melalui hal tersebut secara tidak langsung masyarakat mengawasi proses berjalannya kegiatan pembangunan. Seluruh masyarakat di wilayah Kelurahan Parteker dalam kegiatan ini ikut mengawasi, dimana bentuk pengawasan tersebut seperti pada saat pemasangan *paving block* apabila ada bagian yang seharusnya tertutup *paving block* namun ternyata tidak tertutup atau tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah dibentuk maka hal tersebut harus dilaporkan oleh warga kepada relawan secara langsung.” (Sumber : Wawancara pada tanggal 9 September 2015, pukul 11.00 Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur Kelurahan Parteker)

Peranan masyarakat merupakan peranan yang paling penting dan krusial dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM-MP), khususnya masyarakat kelurahan Parteker. Dalam hal ini, masyarakat kelurahan Parteker selain menjadi perencana pembangunan wilayah kelurahan, khususnya untuk pembangunan jangka panjang, masyarakat juga menjadi kelompok pelaksana atas perencanaan yang telah dibentuk sebelumnya melalui musyawarah desa yang dibantu dan dibimbing oleh tim fasilitator

kelurahan Parteker, tim teknis PNPM-MP serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM-MP). Dengan peranan masyarakat yang begitu besar dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, diharapkan masyarakat dapat merencanakan berbagai pembangunan desa dengan berpusat pada aspek nilai-nilai kearifan lokal (perilaku), dan juga 3 aspek tridaya yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi, sehingga nantinya pembangunan akan mengarah pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perubahan mindset serta mengangkat derajat masyarakat yang berdaya serta mandiri.

c. Dampak Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan

Pelaksanaan suatu program pada akhirnya akan menimbulkan suatu dampak ada pengaruh di suatu kelompok masyarakat ataupun wilayah yang menjadi sasaran dari kebijakan pemerintah, khususnya dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat. Dampak merupakan suatu pengaruh yang disebar melalui cara – cara tertentu dengan tujuan untuk merubah tatanan kehidupan suatu masyarakat agar lebih berdaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM-MP) merupakan suatu program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan berpusat pada aspek nilai – nilai kearifan lokal (perilaku) dan juga mencakup 3 aspek tridaya yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi melalui pembangunan fisik berdasarkan perencanaan yang disusun oleh masyarakat wilayah bersangkutan.

Tujuan umum PNPM-MP adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja sementara tujuan khususnya adalah meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, kapasitas kelembagaan, kapasitas pelayanan pemerintah, sinergi masyarakat, keberdayaan dan kemandirian masyarakat, modal sosial masyarakat, dan meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna (Tim Pengendali PNPM, 2010).

Dampak yang ditimbulkan ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Karena itu dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus melalui perencanaan yang matang sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap individu, masyarakat setempat, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak positif adalah dampak yang dikehendaki atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan dalam masyarakat, sedangkan dampak yang tidak diinginkan adalah dampak yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan oleh masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak positif senantiasa beriringan dengan dampak negatif. Dampak negatif inilah yang kemudian dikategorikan kedalam masalah sosial masyarakat. Oleh karena itu dalam pengendalian, dampak pembangunan yang negatif harus dimanimalisasi atau diperkecil. Sehingga dampak sosial secara keseluruhan dapat berbentuk positif yang besar. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Subhan Taufiq selaku koordinator BKM Adil Makmur.

“Dampak positif yaa banyak mas, taraf hidup masyarakat sini sudah banyak berubah, tingkat gotong royong masyarakat juga menjadi lebih antusias dalam melaksanakan pembangunan, kalau untuk dampak negatifnya sih menurut saya tidak terlalu mencolok mas seperti mungkin

kurangnya kedisiplinan dalam urusan mengembalikan modal seperti yang dialami sama bu Utari itu selaku UPK yang mengurus ekonomi bergulir.”
(Sumber : Wawancara pada tanggal 9 September 2015, pukul 11.00 Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur Kelurahan Parteker)

Jadi diharapkan dengan adanya program PNPM Mandiri Perkotaan tentu saja akan berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan fisik. Dampak yang terjadi dengan adanya program PNPM Mandiri di Desa Sabiyan meliputi: dampak fisik dan dampak ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari program-program yang diselenggarakan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Parteker antara lain:

1. Dampak Fisik

Kegiatan yang dilakukan di Desa Sabiyan diantaranya berupa pembuatan paving jalan. Dampak dari program paving jalan adalah perbaikan akses bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Kegiatan lain yang dilaksanakan PNPM Mandiri di Kelurahan Parteker adalah pembuatan talud (*drainase*) pada jalan masuk desa. Dampak dari program pembuatan talud (*drainase*) adalah agar permukaan jalan tidak tergenang air akibat hujan.

2. Dampak Sosial Ekonomi

Kegiatan Ekonomi yang dilakukan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan berbentuk ekonomi bergulir, yakni pemberian pinjaman modal usaha ke masyarakat dengan system pembayaran berangsur dan tanggung renteng. Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha-usaha produktif. Dampak dari program ekonomi bergulir adalah , warga yang semula kekurangan modal mendapat bantuan modal untuk mengembangkan usahanya.

2) Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Parteker merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana kegiatan ini merupakan kegiatan yang berfokus pada pembangunan fisik dengan mengedepankan prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan dan pendekatan Tridaya (Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi). Dalam proses pelaksanaan program tersebut, dibutuhkan peran multi aktor yang ikut menyusun perencanaan, membimbing, serta melaksanakan pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga dibutuhkan adanya suatu kolaborasi antara pemerintah sampai dengan keikutsertaan masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut terdapat faktor-faktor yang menghambat kegiatan ataupun kendala-kendala yang ditemui. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Subhan Taufiq selaku Koordinator BKM Adil Makmur Kelurahan Parteker.

“Untuk pelaksanaan program PNPM-MP, terkadang tidak semua perencanaan pembangunan yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Pasti masih ada kendala-kendala yang muncul. Adapun pelaksanaan program ini belum berjalan sempurna, akan tetapi pada nantinya akan tetap terlaksana walaupun saya yakin pasti ada saja kendala yang menghambat.” (Sumber : Wawancara pada tanggal 9 September 2015, pukul 11.00 Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur Kelurahan Parteker)

Berikut terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat jalannya kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Parteker.

1. Sukarelawan Masyarakat Kelurahan Parteker yang tidak konsisten dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

Masyarakat merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan masyarakat agar menjadi mandiri dan berdaya dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dengan menggali potensi – potensi yang dimiliki di wilayah yang bersangkutan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, keikutsertaan masyarakat yang kurang dalam penyelenggaraan kegiatan dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sehingga kegiatan perencanaan maupun pembangunan yang sudah terjadwal dengan baik menjadi terhambat. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Subhan Taufiq Selaku Koordinator BKM Adil Makmur.

“Kendala dari masyarakat rata – rata karena mereka sukarelawan dalam tanda kutip tidak dibayar dalam menjalankan kegiatan ini, sehingga dalam melaksanakan suatu pertemuan harus terjadwal dengan baik, dikarenakan kesibukan dari masing – masing masyarakat. Kemudian dalam menghadiri kegiatan, masyarakat sifatnya monoton dalam artian hanya orang – orang itu saja yang hadir dalam setiap kegiatan. Dan pada tim – tim pelaksana Kelurahan Parteker yang dibentuk untuk menyelenggarakan program PNPM-MP, banyak dari sukarelawan yang berhenti. Hal ini dikarenakan proses pelaksanaan kegiatan yang memakan waktu panjang sehingga membuat masyarakat menjadi jenuh sehingga secara tidak langsung banyak masyarakat yang tidak aktif.”
(Sumber : Wawancara pada tanggal 9 September 2015, pukul

11.00 Bertempat di Kantor BKM Adil Makmur Kelurahan Parteker)

2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program pemberdayaan khususnya pada daya ekonomi, dimana kewajiban masyarakat untuk memenuhi tanggungjawabnya pada sektor ekonomi bergulir kurang disiplin.

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Parteker mendapat hambatan khususnya pada sektor ekonomi yang dalam pelaksanaannya terdapat masyarakat masyarakat yang tidak disiplin dalam memenuhi kewajibannya dalam mengikuti program ekonomi bergulir, sehingga membuat Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang mengurus program ekonomi bergulir mendapatkan kesulitan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Tutuk Utari selaku Unit Pengelola Keuangan BKM Adil Makmur

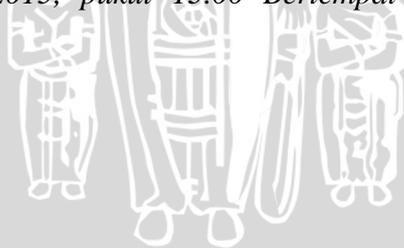
“Kendala yang banyak ditemui terutama bagi ekonomi yang lemah, ini kan UPK PNPM ini kan untuk ekonomi lemah persyaratannya yang harus diberikan, itu ada yang nunggak atau habis uangnya, jadi setelah meminjam mereka lari jika tidak bisa mengembalikan modal yang dipinjam”. (*Sumber : Wawancara pada tanggal 16 September 2015, pukul 13.00 Bertempat di Rumah Ibu Tutuk Utari*)

Selain itu, senada dengan pernyataan diatas, Ibu Sri Wahyuna selaku Sekretaris BKM “Adil Makmur” Kelurahan Parteker mengenai kurang disiplinnya masyarakat sekitar desa dalam memenuhi kewajibannya di ekonomi bergulir yang dilaksanakan oleh BKM Adil Makmur.

“Kebanyakan masyarakat sini itu suka lupa dan ruwet kalau ditagih soal program PNPM-MP ini, padahal program ini sudah sangat membantu mereka dalam menaikkan taraf hidupnya, namun mereka biasanya berdalih bahwa uang yang diberikan bukan uang bu utari yang saat itu menagih ke rumahnya, jadi mereka merasa tidak perlu membayar kepada ibu utari selaku UPK, dari kejadian bisa dilihat bahwa masyarakat sekitar sini masih belum paham bagaimana berjalannya ekonomi bergulir yang semestinya dek...”(Sumber : Wawancara pada tanggal 16 September 2015, pukul 13.00 Bertempat di Rumah Ibu Tutuk Utari)

Ditambahkan lagi oleh Ibu Tutuk Utari Selaku Unit Pengelola Keuangan.

“Kebanyakan kendala di ekonomi bergulir ini dari pembayaran, namun untuk 2013-2015 lancar jarang ada tunggakan, karena bagi masyarakat yang sudah 3x tidak mengikuti aturan maka dicoret dari daftar peminjam yang sudah tercatat. Aturannya jika sudah 4x meminjam maka sudah tidak boleh meminjam lagi, tapi jika mereka memang benar benar butuh ya saya pinjamkan, saya selaku UPK, saya melihat-lihat dulu kinerja orangnya itu gimana, sebenarnya jika wataknya memang sudah seperti itu ya klo ga bayar dia tetep ga mau bayar. Kalau masalah menagih ke rumah itu hal yang biasa, karena itu tanggungjawab selaku pengelola UPK, sudah tugasnya.” (Sumber : Wawancara pada tanggal 16 September 2015, pukul 13.00 Bertempat di Rumah Ibu Tutuk Utari)



C. Analisis Data Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan

a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan

Proses peningkatan taraf hidup masyarakat di suatu wilayah, baik itu dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan dibutuhkan adanya proses pemberdayaan terhadap masyarakat sebelum menerapkan kegiatan yang bersifat partisipatif. Pemberdayaan masyarakat menurut Kartasmita (1996) dalam Prasojo (2004 : 14) menjelaskan bahwa “pemberdayaan masyarakat terkait dengan keberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik kuat, dan inovatif tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.”

Dalam hal ini, pemberdayaan terhadap masyarakat secara khusus adalah untuk menjadikan masyarakat di suatu wilayah agar mandiri dan berdaya dengan menggunakan seluruh kemampuannya mengelola potensi – potensi yang dimiliki nantinya akan dikembangkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Pemberdayaan pada dasarnya memberikan kekuatan kepada pihak yang lemah untuk dapat mengembangkan potensi dirinya, dimana pemberdayaan merupakan suatu wujud dari kerjasama antar pihak – pihak yang bersepakat untuk

menjalankan kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan. Kemitraan adalah “suatu bentuk kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik” (Sulistiyani, 2004 : 129).

Tahapan implementasi sebuah kebijakan publik merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan publik. Untuk itu proses implementasi perlu dipersiapkan dengan baik, sejak dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kebijakan publik. Dalam setiap tahapan implementasi kebijakan publik melibatkan seluruh stakeholder yang ada, baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat secara individu maupun kelompok.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) merupakan salah satu program penganggulangan kemiskinan yang sebelumnya bernama Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa institusi masyarakat yang representatif, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan sebagai proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat yang dilakukan secara terus menerus untuk menumbuhkan kebangsaan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Secara konseptual, PNPM Mandiri Perkotaan memandang bahwa akar penyebab kemiskinan telah menyadarkan berbagai pihak, bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat yang senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai universal kemanusiaan (moral), prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, tahun 2010).

PNPM Mandiri Perkotaan meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya. Substansi ini sebagai upaya proses transformasi PNPM Mandiri Perkotaan dari tataran proyek menjadi tataran program oleh masyarakat bersama pemerintah daerah setempat.

Proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan melibatkan beberapa aktivitas, yakni :

1. Pengorganisasian yang meliputi penataan sumber daya, unit pelaksana dan metodenya sesuai dengan tujuan kebijakan. Tahap ini terdiri dari beberapa komponen pelaksanaan kebijakan, seperti lembaga pelaksana kebijakan, anggaran yang diperlukan, sarana dan prasarana, penetapan tata kerja dan penetapan manajemen kebijakan.
2. Interpretasi atau penafsiran yang berupa penerjemahan dan penjelasan tujuan kebijakan ke dalam kegiatan yang lebih operasional sehingga lebih mudah dipahami oleh lembaga pelaksana maupun pemangku kepentingan dan kelompok sasaran.
3. Aplikasi, yaitu penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok sasaran kebijakan (*target group*), yang berupa penyediaan layanan, pembayaran, atau pelaksanaan instrumen atau tujuan yang telah disepakati bersama.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan agar terwujud tujuan yang hendak dicapai PNPM Mandiri Perkotaan adalah :

- 1) Melembagakan pola pembangunan partisipatif yang pro-poor dan berkeadilan melalui :
 - a. Pembangunan lembaga masyarakat (BKM) yang representatif, akuntabel dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan.
 - b. Perencanaan partisipatif dalam menyusun PJM-Pronangkis, IPM dan MDGs.

- 2) Menyediakan BLM secara transparan untuk menandai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mudah dilakukan oleh masyarakat dan membuka kesempatan kerja melalui :
 - a. Pembangunan sarana/prasarana lingkungan
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
 - c. Pengembangan ekonomi lokal
- 3) Memperkuat keberlanjutan program dengan :
 - a. Menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat melalui proses penyadaran kritis dan pengelolaan hasil-hasilnya
 - b. Meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah dalam perencanaan, penganggaran dan pengembangan pasca program.
 - c. Meningkatkan efektifitas perencanaan dan penganggaran yang lebih pro-poor dan berkeadilan.

Berdasarkan prinsip-prinsip dan pendekatan tersebut diatas maka upaya upaya rasional dalam mencapai tujuan program dilaksanakan dengan :

1. Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pelaksanaan PNPM-MP
2. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam pelaksanaan PNPM-MP secara partisipatif
3. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis.

Melihat dari fenomena di lapangan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di

Kelurahan Parteker, peneliti memfokuskan pada kajian proses pelaksanaan program dalam PNPM-MP. Dimana dalam hal ini program PNPM-MP memberikan kesempatan yang sangat luas kepada masyarakat agar bisa merencanakan pembangunan desa yang bertumpu pada Tridaya yaitu Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi, yang dipersiapkan untuk jangka panjang untuk manata pemukiman, seperti sarana dan prasarana infrastruktur pendukung kegiatan masyarakat.

Kelurahan Parteker merupakan salah satu pelaksana PNPM-MP di Wilayah Kabupaten Pamekasan. Dimana Kelurahan Parteker memiliki Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Adil Makmur yang telah menunjukkan kinerja yang baik sesuai dengan pendekatan pendekatan yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian BKM Adil Makmur merupakan lokasi PNPM yang berkinerja baik bersama Pemerintah Kota/ Kabupaten yang masih menerapkan prinsip-prinsip universal dan budaya lokal. Sehingga kegiatan pemberdayaan melalui PNPM-MP masih terus berjalan, dimana masih adanya persoalan-persoalan Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi yang harus segera diselesaikan yang secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan di masyarakat, khususnya di Kelurahan Parteker, namun dikarenakan BKM mengalami *Overload* tugas yang disebabkan oleh salah satu *stakeholders* yang kurang melaksanakan tugasnya dengan baik, maka hal tersebut berdampak pada kegiatan lain yang akan dilaksanakan oleh BKM.

b. Peran Multiaktor dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan

Dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, peran Pemerintah Daerah adalah sebagai fasilitator, regulator, dinamisator dan koordinator. Sebagai fasilitator, Pemerintah Daerah berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dengan menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan kegiatan. Sebagai Regulator, Pemerintah Daerah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan PNPM Mandiri Perkotaan dengan menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi. Sebagai dinamisator, berperan menggerakkan partisipasi masyarakat dengan mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Sebagai koordinator, Pemerintah daerah berperan untuk mengintegrasikan program-program berbasis penanggulangan kemiskinan melalui mekanisme perencanaan partisipatif, seperti musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.

Dalam kerangka tersebut, untuk mengefektifkan dan melancarkan jalannya program maka bentuk-bentuk bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk pendampingan dan bantuan dana yang disebut Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Untuk bantuan pendampingan diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di kelurahan masing masing.

Apabila dilihat dari level kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Bromley (1989 : 32) bahwa ada 3 level kebijakan yakni “*Policy level Organisational level and Operational level*”, maka PNPM Mandiri Perkotaan termasuk dalam kategori *Operational level*, dimana implementasi program in berada pada level eksekutif, khususnya pada satuan pelaksana (*operatingunits*) dalam masyarakat. Untuk itu implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang disebut Bada atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM). BKM/LKM dibentuk sebagai wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarkan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulanga kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri da berkelanjutan. Kegiatan-kegiatannya meliputi proses penentuan kebutuhan pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan progra sampai pemanfaatan dan pemeliharaan.

Tiap BKM/LKM bersama-sama masyarakat melakukan prose perencanaan partiisipatif dengan menyusun Perencanaan Jangka Menenga dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM dan Rent Pronangkis), sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskina di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakars masyarakat, LKM/BKM menjalin kemitraan dengan berbagai instans pemerintah dan kelompok peduli setempat. Untuk itu diperlukan sinergitas dan komitmen diantara lembaga pelaksana dalam implementasi PNP Mandiri Perkotaan Peran Pemerintah Kota Pamekasan dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai

fasilitator, regulator, dinamisor dan koordinao dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Sebagai fasilitator, adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani) kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah
2. Sebagai regulator, adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan)
3. Sebagai dinamisor, adalah menggerakkan partisipasi multi pihak ketika stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah)
4. Sebagai koordinator, adalah mengintegrasikan program-program berbasis penanggulangan kemiskinan (melalui mekanisme perencanaan partisipatif, seperti musyawarah rencana pembangunan)

Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah kota tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Pamekasan mengangkat Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan yang dibantu Asisten Korkot di bidang keuangan, teknik/infrastruktur, manajemen data dan penataan ruang untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan di bawah koordinasi Team Leader KMW (Konsultan Manajemen Wilayah). Level birokrasi terendah sebagai implementor PNPM Mandiri Perkotaan adalah kelurahan. Di tingkat kelurahan, unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah: (1) Lurah dan perangkatnya, (2) Relawan masyarakat, (3) LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), (4) KSM

(Kelompok Swadaya Masyarakat. Lurah sebagai koordinator ketiga unsur pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di masyarakat kelurahan, mempunyai tugas untuk memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Relawan masyarakat merupakan pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayah kelurahan yang bersangkutan. PNPM Mandiri Perkotaan mendorong masyarakat di lokasi sasaran program agar membuka kesempatan seluas mungkin bagi warga yang ikhlas, jujur, adil, peduli dan memiliki komitmen untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan program agar bermanfaat bagi masyarakat miskin serta seluruh masyarakat diwilayahnya.

Relawan masyarakat dibentuk sebagai upaya untuk menjalankan seluruh proses PNPM Mandiri Perkotaan yang direncanakan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat atau peningkatan kapasitas. Diharapkan relawan masyarakat menjadi pelopor dalam siklus program, refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembentukan BKM/LKM, pengorganisasian KSM dan perencanaan partisipatif. Relawan masyarakat yang ada di Kota Pamekasan direkrut untuk masing – masing kelurahan yang jumlahnya menyesuaikan kegiatan yang ada dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Jenis kegiatan dalam PNPM Mandiri Perkotaan meliputi kegiatan di bidang sosial, bidang ekonomi dan lingkungan. Untuk masing-masing kegiatan didampingi oleh relawan masyarakat sebagai mitra kerja

LKM/BKM di setiap kelurahan yang ada di Kota Pamekasan. Setiap relawan masyarakat berfungsi sebagai pengawas partisipatif terhadap keseluruhan proses sehingga bisa terbangun *control social* yang bagus. Sebagai mitra kerja BKM, maka para relawan masyarakat akan membentuk Forum Relawan dan berhak mendapat informasi perkembangan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh Badan Keswadayaan Masyarakat.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang ada pada setiap kelurahan bertanggung jawab untuk menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan perkotaan.

BKM/LKM mempunyai peran utama untuk mengorganisasikan warganya secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. BKM harus mampu menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan jaringan BKM di tingkat kecamatan dan kota sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam PNPM Mandiri Perkotaan, masing-masing BKM membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). KSM merupakan nama generik untuk kelompok warga masyarakat pemanfaat dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dalam Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. KSM diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator yang terdiri dari warga kelurahan yang memiliki ikatan kebersamaan (*commonbond*) dan yang berjuang untuk mencapai tujuan bersama.

KSM bukan hanya sekedar pemanfaat pasif dana Bantuan Langsung Masyarakat, melainkan juga sebagai pelaksana kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh LKM/BKM melalui berbagai dana yang mampu digalang. Oleh sebab itu, tugas pokok KSM adalah sebagai berikut :

1. Menyusun usulan kegiatan pembangunan terkait dengan penanggulangan kemiskinan
2. Mengelola dana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatan pembangunan yang diusulkan
3. Mencatat dan membuat laporan kegiatan dan keuangan kegiatan pembangunan yang diusulkan
4. Menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan pembangunan , seperti transparansi, demokrasi, membangun dengan mutu dan lain-lain
5. Secara aktif menjadi bagian dari kendali sosial (*control social*) pelaksanaan penanggulangan kemiskinan diwilayahnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, dalam pelaksanaan program PNPM-PM di Kelurahan Parteker, peranan multi aktor seperti yang dijelaskan diatas sudah banyak yang sesuai dengan kenyataan, namun ada beberapa peranan yang belum melaksanakan perannya sebagai salah satu *stakeholders* dengan baik, seperti lurah dari Kelurahan Parteker yang cenderung melimpahkan tanggung jawab kepada BKM, sehingga kinerja BKM menjadi *overload*. Koordinator BKM sendiri mengutarakan kepada peneliti bahwa peran Lurah di Kelurahan Parteker cenderung pasif. Sementara itu untuk masyarakat sebagai unsur utama dari program PNPM-MP ini, peneliti merasa masyarakat sudah melakukan tugasnya dengan baik, baik itu di dalam BKM ataupun KSM, partisipasi masyarakat cukup antusias dalam melakukan pembangunan ataupun dalam perencanaan pembangunan.

c. Dampak Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme tentang upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Diharapkan dengan adanya program PNPM Mandiri Perkotaan tentu saja akan berdampak terhadap meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. selain itu juga berpengaruh terhadap interaksi sosial manusia yang ada di wilayah tersebut.

Dampak yang ditimbulkan ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. karena itu dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus melalui perencanaan yang matang sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap individu, masyarakat setempat, dan masyarakat secara keseluruhan . Dampak positif adalah dampak yang dikehendaki atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan dalam masyarakat, sedangkan dampak yang tidak diinginkan adalah dampak yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan oleh masyarakat. Dampak yang terjadi dengan adanya program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Parteker meliputi: dampak fisik dan dampak ekonomi, dampak fisik berakibat pada perbaikan infrastruktur, sedangkan dampak sosial ekonomi berakibat pada peningkatan pendapatan.

Berdasarkan kenyataan yang didapatkan peneliti di lapangan, dengan adanya pelaksanaan program PNPM-MP ini, dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, dari 3 daya Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi, dampak paling dirasakan ada di tingkat Lingkungan dan Ekonomi masyarakat. Dampak lingkungan dapat dilihat dari adanya *drainase* yang diperbarui sehingga akan mencegah meluapnya air yang biasanya terjadi di lingkungan Kelurahan Parteker, untuk dampak ekonomi sangat terasa dimana tingkat taraf hidup masyarakat yang sudah berbeda dibandingkan saat belum adanya program ekonomi bergulir yang

merupakan program ekonomi dari PNPM-MP, untuk program sosial, seharusnya ada pelatihan pelatihan untuk ibu – ibu agar mendapatkan ketrampilan dan bisa ikut dalam program ekonomi bergulir, namun pada saat peneliti turun ke lapangan, menurut koordinator BKM sedang tidak ada kegiatan Sosial dari PNPM-MP sehingga dari 3 daya diatas, hanya dampak Lingkungan dan Ekonomi yang sangat terlihat dampaknya.

2. Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan

Konsep pemberdayaan dalam paradigma pembangunan masyarakat pada sebuah komunitas bisa dianggap sebagai konsep yang relatif lebih baik dan membawa manfaat yang lebih besar, namun dalam implementasinya masyarakat tidak akan serta merta ikut dan berpartisipasi penuh dalam program tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yang oleh Sumaryadi (2005: 154-158) dijabarkan menjadi 8 faktor yang berpengaruh sebagai berikut:

1. Kesiediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya
2. Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.

3. Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas.
4. Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.
5. Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.
6. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya.
7. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
8. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (*resource*) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka hasil dari sebuah upaya pemberdayaan akan sangat tergantung dari kondisi masyarakat dan para serta semua stakeholder yang terlibat dalam program pemberdayaan tersebut.

Masyarakat merupakan pemeran utama (*Primary Actor*) dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), dengan melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan dana,

pembangunan, dan monitoring terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan secara swadaya dan mandiri berdasarkan keputusan bersama akan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti mendapati adanya faktor penghambat utama dalam program PNPM-MP yang sedang berjalan, khususnya untuk sektor daya Ekonomi, dimana masyarakat kurang memahami proses, tujuan, dan tanggung jawab masyarakat sebagai pelaku utama program PNPM-MP di program ekonomi bergulir. Unit Pengelola Keuangan merasakan kesulitan yang amat ketika harus berurusan dengan masyarakat yang bisa dikatakan tidak paham akan tanggung jawabnya. Sedangkan untuk faktor penghambat lain yaitu adanya kesulitan untuk mencari sukarelawan yang konsistensi dalam melakukan perencanaan maupun proses pembangunan. Sehingga menghambat proses pembangunan dan memakan jangka waktu yang relatif panjang.

Tabel 15 : Eksisting Hasil Penelitian

Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian	Kesimpulan
1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan?	1. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan	<p>Proses sudah berjalan baik sesuai dengan pedoman pelaksanaan PNPM-MP</p> <p>BKM dalam prosesnya sebagai salah satu stakeholders sudah melakukan tugasnya dengan baik, namun mengalami <i>overload</i> tugas</p>	<p>Proses implementasi program PNPM-MP ini sudah sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan di pembahasan, namun hasil dari program PNPM-MP ini belum menunjukkan hasil paling maksimal seperti kegiatan yang molor dari jadwal yang sudah ditentukan dikarenakan BKM yang <i>Overload</i> tugas, meskipun sebenarnya proses dari program PNPM-MP ini sudah dijalankan dengan baik.</p>
	2. Peran Multiaktor dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan	<p>Lurah kurang bekerja sebagaimana mestinya dalam program PNPM-MP dan cenderung pasif melimpahkan tugas kepada BKM</p> <p>Masyarakat telah melakukan kewajibannya sebagai pemeran utama dari program PNPM-MP</p>	<p>Keterlibatan aktor dalam menunjang program PNPM-MP sudah berjalan dengan baik antara BKM, KSM, Masyarakat, dan Pemerintah. Komunikasi antar semua elemen yang terlibat sudah berjalan dengan runtut sebagaimana mestinya, namun</p>

		<p>ini.</p>	<p>adanya kinerja yang kurang dari salah satu <i>stakeholders</i> yaitu Lurah dari Kelurahan Parteker, memberikan dampak yang signifikan dalam proses program PNPM-MP.</p>
	<p>3. Dampak Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan</p>	<p>Dampak signifikan ditunjukkan pada Lingkungan masyarakat Kelurahan Parteker salah satunya <i>drainase</i> yang dibangun maupun jalan jalan diperbaiki</p> <p>Ekonomi Masyarakat Parteker yang sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya sejak adanya program Ekonomi Bergulir yang dilaksanakan oleh BKM Adil Makmur.</p> <p>Sementara itu dalam daya Sosial sedang tidak ada kegiatan yang dilakukan saat peneliti melakukan penelitian.</p>	<p>Dampak dari program PNPM-MP dapat dilihat dari 3 daya, yaitu Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi. Ketiga sektor ini mengalami perubahan yang sangat signifikan dari sebelum adanya program PNPM-MP,</p>
<p>2. Apakah faktor penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p>	<p>Faktor penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker</p>	<p>Masyarakat menjadi faktor penghambat yang paling terlihat, dimana pada Ekonomi</p>	<p>Masyarakat kurang memahami proses, tujuan, dan tanggung jawab masyarakat sebagai</p>

<p>Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan?</p>	<p>Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan</p>	<p>Bergulir, masyarakat kurang memahami proses, tujuan, dan tanggungjawabnya sebagai peminjam, sehingga Unit Pengelola Keuangan mengalami banyak kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya sukarelawan masyarakat yang konsistensi dalam melakukan proses perencanaan pembangunan ataupun proses pembangunan</p>	<p>pelaku utama program PNPM-MP Adanya kesulitan untuk mencari sukarelawan yang konsistensi dalam melakukan perencanaan maupun proses pembangunan. Sehingga menghambat proses pembangunan dan memakan jangka waktu yang relatif panjang.</p>
---	---	---	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan dari Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan, adalah sebagai berikut :

1. Semua proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari salah satu *stakeholders* yaitu BKM. BKM sebagai wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. Proses implementasi pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-MP ini sudah sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan di pembahasan, namun hasil dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal tersebut dikarenakan kegiatan yang berjalan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dikarenakan BKM mengalami *Overload* tugas, meskipun sebenarnya proses ini sudah dijalankan dengan baik.
2. Keterlibatan aktor dalam menunjang proses pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-MP sudah berjalan dengan baik antara BKM, KSM, Masyarakat, dan Pemerintah. Komunikasi antar semua elemen yang

terlibat sudah berjalan dengan runtut sebagaimana mestinya, namun adanya kinerja yang kurang dari salah satu *stakeholders* yaitu Lurah dari Kelurahan Parteker, memberikan dampak yang signifikan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

3. Dampak dari pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-MP dapat dilihat dari 3 daya, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Ketiga sektor ini mengalami perubahan yang sangat signifikan dimana setiap tahun BKM mendapatkan kucuran dana BLM dari pemerintah untuk membiayai perencanaan pelaksanaan kegiatan (Lingkungan, ekonomi, dan sosial) di masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut BKM menggandeng potensi-potensi yang ada di masyarakat termasuk pelaku-pelaku usaha di Kelurahan Parteker. Seperti dalam memenuhi kebutuhan untuk membangun lingkungan fisik bahan-bahan bangunan diambalkan dari masyarakat sekitar. Serta dengan adanya bantuan dari dana BLM, masyarakat bisa membuka usaha baru sehingga memacu roda pertumbuhan ekonomi mikro di masyarakat.
4. Faktor penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan
 - a. Masyarakat kurang memahami proses, tujuan, dan tanggung jawab masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Adanya kesulitan untuk mencari sukarelawan yang konsistensi dalam melakukan perencanaan maupun proses pembangunan. Sehingga

menghambat proses pembangunan dan memakan jangka waktu yang relatif panjang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan dari hasil penelitian, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi Kelurahan Parteker dalam upaya untuk menerapkan Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM-MP. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan penyuluhan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kepada semua *stakeholders*, sehingga peran semua aktor dapat bekerja dengan maksimal dan memberikan hasil yang terbaik. Penyuluhan ataupun pemantauan dapat dilakukan oleh pihak pemerintah daerah kepada semua pihak terkait seperti Lurah, BKM, KSM ataupun Masyarakat Kelurahan Parteker secara langsung sehingga semua proses dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Perlunya pemantauan berkala dari pihak pemerintah daerah saat proses perencanaan, berlangsungnya, maupun evaluasi program terkait. Sehingga pihak-pihak terkait (seperti Lurah ataupun Masyarakat) dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagai salah satu *stakeholders* penting dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut.
3. Perlu adanya pemberian motivasi lebih kepada masyarakat, agar tingkat antusiasme masyarakat meningkat dalam proses perencanaan pembangunan maupun proses pembangunan. Untuk menjaga konsistensi dari masyarakat yang menjadi sukarelawan seharusnya terdapat tim teknis yang melakukan

pemantauan dan pembimbingan secara berkala selama kegiatan berlangsung. Dengan adanya pemantauan, maka masyarakat dapat terbantu dalam pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat, dimana konsistensi masyarakat Kelurahan Parteker yang menjadi sukarelawan berkurang dikarenakan kejenuhan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu pemberian *reward* atau penghargaan kepada sukarelawan dibutuhkan agar antusiasme dan kinerja masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Ala, Andre Bayo, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Bank Dunia. 1990. *Indonesia: Poverty Assessment and Strategy Report*. Report, No. 8034-IND, Country Department III East Asia and Pacific Region. Washington.
- Bappenas, 2002. *Kebijakan dan strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: agglomeration of Jakarta*. Jabodetabek. Jakarta.
- Indrawijaya, Anwar Ibrahim dan Juni Pranoto. 2011. *Revitalisasi Administrasi Pembangunan : Berbasis Jati Diri dan Karakter Bangsa dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alfabeta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Keban, Yeremias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep*,
- Krisnamurthi, Bayu. 2006. *Penanggulangan dan Pengurangan Kemiskinan dalam 22 Tahun Studi Pembangunan Pengurangan Kemiskinan, Pembangunan Agribisnis dan Revitalisasi Pertanian* : LPPM IPB. Bogor.
- Kuncoro Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga, Yogyakarta : U P P A M P Y K P N*.
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, 1996. *Stategi Pembangunan Ekonomi Dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta
- Mutaqien, Arip, et all. 2006. *Menuju Indonesia Sejahtera Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan Pengantar: M. Dawam Rahardjo*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Nazir, Muhammad. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia.
- Papilaya, E.C. 2006. *Akar Penyebab Kemiskinan Menurut Rumah Tangga Miskin dan strategi Penanggulangannya*.

Parsudi Suparlan, 1984, *Kebudayaan Kemiskinan, dalam Kemiskinan di Perkotaan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia – Sinar Harapan.*

Pasolong, Harbani. 2007. “Teori Administrasi Publik”, Bandung: CV Alfabeta

Prasojo, Eko. 2004. *People and Society Empowerment : Perspektif Membangun Partisipasi Publik. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. IV, No. 2.*

Prijono, O.S. & Pranarka, A.M.W. (Ed) (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: CSIS.*

Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Spektrum Pemikiran.* Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP – STKS).

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan.* Yogyakarta : Penerbit Gaya Media.

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial.* Jakarta : Gramedia.

Suryono, Agus , 2001. *Teori dan Isu Pembangunan,* Universitas Malang Press, Malang .Teori, dan Isu.Yogyakarta. Gava Media.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi).* Jakarta: Rineka Cipta

Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya.1982. *Teori Dan Strategi Pembangunan Nasional,* Jakarta: PT Gunung Agung

Tjokrowinoto, Moeijarto. 1995. *Politik Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Tujuan.* Yogyakarta: PT Tiara wacana

http://p2kp-urbanpoverty.blogspot.com/2006/05/konsep-dasar-p2kp_30.html
Definisi dan Istilah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM - Mandiri)

<http://www.p2kp.org/aboutdetil.asp?mid=4&catid=2&>

<http://www.infodiknas.com/definisi-dan-teori-pemberdayaan.html>

<http://www.tnp2k.go.id/id/program/program/dprogram-program-nasional>

[pemberdayaan-masyarakat-mandiri-pnpm-mandiri/](http://www.tnp2k.go.id/id/program/program/dprogram-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-mandiri-pnpm-mandiri/)

http://www.suarasurabaya.net/print_news/Ekonomi%20Bisnis/2014/133727-

[Madura-Masuk-Zona-Merah-Dengan-Kemiskinan-Tertinggi-di-Jatim](http://www.suarasurabaya.net/print_news/Ekonomi%20Bisnis/2014/133727-Madura-Masuk-Zona-Merah-Dengan-Kemiskinan-Tertinggi-di-Jatim)